

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN DOSEN PEMULA



UNIVERSITAS TERBUKA

**PERSEPSI MAHASISWA JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP
UNIVERSITAS TERBUKA
TERHADAP PERILAKU ANTI KORUPSI BIROKRASI**

TIM PENGUSUL :

Suyatno, S.IP, M.Si

NIDN : 0026037404

Drs. Mohammad Syarif, M.Pd.

NIDN :0023125902

UNIVERSITAS TERBUKA

2013

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA**

Judul Penelitian : PERSEPSI MAHASISWA JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNIVERSITAS TERBUKATERHADAP PERILAKU ANTI
KORUPSI BIROKRASI

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 597 / Ilmu Pemerintahan

Ketua Peneliti:

- a. Nama Lengkap : Suyatno, SIP.,M.Si
- b. NIDN : 0026037404
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan
- e. Nomor HP : 085656230975
- f. Alamat surel (e-mail) : suyatno@ut.ac.id

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : Drs. Mohammad Syarif, M.Pd
- b. NIDN : 0023125902
- c. Perguruan Tinggi : Universitas Terbuka

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap :
- b. NIDN :
- c. Perguruan Tinggi :

Biaya Penelitian : - diusulkan ke DIKTI Rp. 15.000.000,00
- dana internal PT Rp
- dana institusi lain Rp.
- *inkind* sebutkan

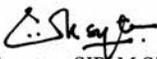


Mengetahui,
Kepala UPBJJ-UT Malang
Prof. Dr. Bambang Sugeng, M.A.,MM
NIP.16631229 199001 1 001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D
NIP 19610724 198701 2 001

Malang, Desember 2013

Ketua Peneliti,

Suyatno, SIP.,M.Si
NIP 19740326 200812 1 003

Menyetujui,
Kepala PAU-PPI/PUSLITGASIS

Dr. Benny A. Pribadi, M.A.
NIP 19610509 198703 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Birokrasi.....	8
B.Perilaku Anti Korupsi.....	11
C.Persepsi.....	20
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	22
A.Pengumpulan Data.....	22
B. Analisis Data	23
C.Hipotesis.....	24
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
1.Hasil	27
1.A. Data Demografi	27
1.B.Data Riset Mengenai Akuntabilitas.....	27
1.C.Data Riset Mengenai Transparansi.....	32
1.D.Data Riset Mengenai Prinsip Kewajaran	36
2.Pembahasan.....	38
2.A. Persepsi Mahasiswa Terhadap Akuntabilitas Pelayanan Birokrasi	38
2.B.Persepsi Mahasiswa Terhadap Transparansi Pelayanan Birokrasi.....	48
2.C.Persepsi Mahasiswa Terhadap Prinsip Kewajaran Pelayanan Birokrasi	58
3.Persepsi Mahasiswa Terhadap Perilaku Anti Korupsi Birokrasi	66
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	71
A.Kesimpulan.....	71
B.Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
Lampiran a	75
Lampiran b.....	76
FORM ORGANISASI TIM PENELITI.....	83
FORMAT BIODATA KETUA PENELITI.....	85
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI.....	85

RINGKASAN

Pemahaman tentang perilaku anti korupsi patut dimiliki masyarakat khususnya generasi muda dan mahasiswa. Ketepatan pemahaman dalam kedudukannya akan mempengaruhi tingkat kedalaman dan keluasan makna anti korupsi. Pemaknaan ini akan berakibat pada sikap dan tindakan seseorang terhadap perilaku anti korupsi. Konsep perilaku anti korupsi merupakan awal yang penting bagi sikap menolak korupsi.

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai sikap mahasiswa terhadap perilaku korup, ternyata memunculkan penilaian bahwa perilaku yang tidak terkait dengan dirinya akan dinilai negatif. Sementara perilaku yang terkait dengan dirinya maka mahasiswa relatif menoleransinya (Falah,2012).

Jika hal ini dianalogikan terhadap perilaku anti korupsi, maka muncul dugaan kondisinya akan lebih rentan. Sebab sikap anti korupsi jauh lebih berat dilakukan. Sikap ini membutuhkan tekad dan keberanian yang lebih besar dibandingkan bersikap dan menindaki pelaku koruptor. Sehingga studi ini akan melihat persepsi mahasiswa tidak kepada perilaku korup tetapi pada perilaku anti korupsi.

Mahasiswa sebagai salah satu bagian masyarakat terpelajar selayaknya memiliki pengetahuan tentang perilaku anti korupsi yang cukup memadai. Untuk persepsi tersebut maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : ***Berapa kuat persepsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Terbuka terhadap perilaku anti korupsi ?***

Penelitian ini akan menggunakan metode survei dan analisis dalam bentuk interpretasi kritis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan informasi dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada mahasiswa yang menempuh mata kuliah IPEM4430 Etika Pemerintahan pada masa akademik 2013.

Data primer dikumpulkan dari mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Terbuka yang mengikuti kuliah Etika Pemerintahan secara sampel melalui kuisisioner. Cara pengumpulan informasi melalui kuisisioner terkirim (*mailed questionnaire*).

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jawaban yang terkirim. Sedangkan sampel akan diambil dari populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan adalah cara penarikan sampel acak sederhana (*simple random sampling*). Penentuan jumlah sampel menggunakan cara yang dikembangkan Isaac dan Michael (Sugiyono, 2010).

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert. Skala tersebut merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuisisioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei (www.wikipedia.com). Akhir dari penelitian ini bertujuan untuk mencari kesimpulan mengenai persepsi mahasiswa. Penarikan kesimpulan juga dilakukan terhadap norma-norma atau kriteria-kriteria yang berlaku dalam perilaku anti korupsi pada para pejabat negara.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat persetujuan tiga aspek perilaku anti korupsi birokrasi cukup tinggi . Di mana tingkat persetujuan terhadap akuntabilitas pelayanan birokrasi mahasiswa terhadap termasuk agak tinggi. Sedangkan tingkat persetujuan terhadap transparansi pelayanan birokrasi termasuk agak tinggi. Demikian juga tingkat persetujuan mahasiswa terhadap prinsip kewajaran dalam pelayanan birokrasi yang agak tinggi.

BAB. I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus korupsi menjadi kasus mega rumit di negeri ini. Terutama dalam setahun terakhir (tahun 2012) korupsi mewarnai dinamika kehidupan pemerintahan. Keuangan Negara yang seharusnya di gunakan untuk membangun negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat telah disalahgunakan oleh sejumlah aparat negara dan pihak swasta.

Jumlah uang negara tersebut tidaklah sedikit mencapai milyaran dan bahkan triliun rupiah. Apabila jumlah uang tersebut tidak diselewengkan maka akan dapat digunakan bagi kepentingan pembangunan kemakmuran rakyat. Dana bisa digunakan untuk program pengentasan keiskinan, perbaikan fasilitas publik dan penanggulangan bencana. Anggaran juga bisa diarahkan bagi pendidikan dan kesehatan agar kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.

Bentuk korupsi bisa berupa pengambilan dana proyek atau pembayaran tidak resmi (suap). Pengambilan dana proyek biasanya dilakukan dengan memotong anggaran atau penggelembungan nilai suatu pekerjaan atau barang.

Akibat kebiasaan korupsi banyak lembaga negara yang semestinya menjadi pelayan masyarakat berubah menjadi ajang menerima suap. Masyarakat yang memerlukan jasa dari lembaga-lembaga negara harus mengeluarkan uang pelicin agar mendapatkan pelayanan yang diinginkannya.

Data tentang perilaku kebiasaan suap di berbagai lembaga negara cukup memprihatinkan. Kebanyakan lembaga tersebut melayani kepentingan umum. Terkadang masyarakat mau tidak mau harus berhadapan dengan kenyataan yang ironis ini. Kebiasaan ini sudah berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Berikut data lembaga yang di dalamnya seringkali berlangsung kasus suap.

Tabel 1. Lembaga Publik Tempat Korupsi Paling Lazim

LEMBAGA	%
Badan Petanahaan Nasional	24,0
Departemen Perindustrian dan Perdagangan	22,9
Departemen Kehutanan	20,0
Departemen Dalam Negeri	18,5

Sumber: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan (2002) (U Maman Kh,2011)

Sampai pada tahun 2013 ini tercatat akibat korupsi, uang Negara menguap Rp168,19 triliun. Lembaga Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, merilis hasil analisis terhadap 1365 kasus korupsi yang sudah mendapatkan putusan tetap dari Mahkamah Agung. Ada 1842 terdakwa koruptor selama 2001 sampai 2012, dengan nilai total hukuman finansial Rp15,09 triliun. Data itu jauh sekali dibandingkan dengan nilai denda finansial untuk koruptor yang hanya sebesar 8,9 persennya saja atau berarti negara kehilangan uang sebanyak Rp 153,1 triliun (www.tempo.co).

Pemahaman tentang perilaku anti korupsi patut dimiliki masyarakat khususnya generasi muda dan mahasiswa. Ketepatan pemahaman dalam kedudukannya akan mempengaruhi tingkat kedalaman dan keluasan makna anti korupsi. Pemaknaan ini akan berakibat pada sikap dan tindakan seseorang terhadap perilaku anti korupsi. Konsep perilaku anti korupsi merupakan awal yang penting bagi sikap menolak korupsi. Pemberantasan korupsi tidak saja sekedar menindak perilaku yang terlanjur korupsi. Penolakan terhadap kebiasaan koruptif juga akan sangat menentukan. Hal ini akan semakin kondusif bila pemahaman perilaku anti korupsi masyarakat tinggi.

Konsep perilaku anti korupsi di atas merupakan realita bangsa kita. Realita yang membutuhkan pemahaman yang tepat dan kearifan dalam bersikap agar kehidupan bersama sebagai masyarakat berlangsung dengan baik.

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai sikap mahasiswa terhadap perilaku korup, ternyata memunculkan penilaian bahwa perilaku yang tidak terkait dengan dirinya akan dinilai negatif. Sementara perilaku yang terkait dengan dirinya maka mahasiswa relatif menoleransinya (Falah,2012). Hal ini menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan karena bila nanti menjadi pejabat publik maka mahasiswa juga akan permisif terhadap perilaku korup.

Hasil penelitian Falasifatul Falah tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar mahasiswa menganggap bahwa korupsi yang dilakukan oleh PNS, anggota DPR atau pejabat pemerintah adalah perbuatan yang memalukan. Mahasiswa berbeda sikap ketika menilai tindakan nepotisme dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil, keduanya sama-sama merupakan bentuk dari penyalahgunaan jabatan, namun ternyata mahasiswa bersikap lebih “lunak” pada bentuk perilaku ini dengan menganggapnya sebagai perbuatan yang wajar.

Berbicara mengenai perilaku korup dalam konteks akademik, seluruh subjek yang diwawancara menyatakan bahwa menyontek adalah hal yang lumrah dan biasa di kalangan mahasiswa, bahkan semua subjek meyakini hampir 100% mahasiswa pernah menyontek. Menjiplak karya orang lain juga dinilai oleh para subjek sebagai perbuatan yang lumrah asal tidak dilakukan mentah-mentah, dalam arti masih ada usaha untuk menyunting hasil jiplakan tersebut sehingga tidak 100% menjiplak.

Jika hal ini dianalogikan terhadap perilaku anti korupsi, maka muncul dugaan kondisinya akan lebih rentan. Sebab sikap anti korupsi jauh lebih berat dilakukan. Sikap ini membutuhkan tekad dan keberanian yang lebih besar dibandingkan bersikap dan menindak pelaku koruptor. Sehingga studi ini akan melihat persepsi mahasiswa tidak kepada perilaku korup tetapi pada perilaku anti korupsi.

B. Perumusan Masalah

Persepsi mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi merupakan salah satu unsur penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Mahasiswa sebagai salah satu bagian masyarakat terpelajar selayaknya memiliki pengetahuan tentang perilaku anti korupsi yang cukup memadai. Hal ini terlebih didukung posisi mahasiswa yang memiliki potensi besar menjadi pengganti para pejabat di negara ini di masa depan. Perilaku anti korupsi patut dimiliki oleh para calon pemimpin dan pejabat negara agar Indonesia bisa terbebas dari korupsi. Persepsi mereka merupakan kondisi awal dari perilaku anti terhadap korupsi. Dengan demikian persepsi mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi penting diketahui.

Untuk persepsi tersebut maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Berapa kuat persepsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Terbuka terhadap perilaku anti korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat sejumlah hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini :

- 1) Menilai pengetahuan mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi pada para aparat Negara (birokrat).
- 2) Mengetahui jenis-jenis perilaku anti korupsi pada para birokrat
- 3) Mengukur persepsi mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi pada aparatur Negara.

D. Manfaat Penelitian

Ada sejumlah faedah yang diharapkan muncul dari studi ini. Beberapa faedah itu bisa disebutkan sebagai berikut ;

- 1) Memberikan bahan untuk pengetahuan khalayak tentang perilaku anti korupsi pada birokrasi.
- 2) Hasil penelitian ini menjadi bahan dimanfaatkan dalam penulisan artikel dan kajian-kajian ilmiah dalam jurnal guna pengembangan ilmu sosial, khususnya ilmu pemerintahan.
- 3) Memberikan bahan kajian dalam penerapan kebijakan pemerintah maupun dalam keperluan kehidupan masyarakat luas terkait pemberantasan korupsi..

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini akan melihat persepsi mahasiswa terhadap perilaku antikorupsi birokrasi di Indonesia. Ada sejumlah elemen yang dapat dilihat untuk memahami perilaku antikorupsi pada birokrasi. Elemen-elemen itu secara umum mempengaruhi pemahaman antikorupsi pada masyarakat. Artinya masyarakat dalam hal ini mahasiswa dapat memberikan penilaian terhadap perilaku antikorupsi birokrasi..

A. Birokrasi

Pada bagian ini dijelaskan arti yang dimaksud dengan birokrasi. Dengan kata lain birokrasi yang mana dan seperti apa yang memiliki perilaku antikorupsi dan dapat dilihat dalam penelitian ini.

Terkait dengan pelaksanaan fungsinya, dalam kehidupan sehari-hari birokrasi bisa dimaknai secara konotatif maupun denotatif. Secara konotatif birokrasi akan dihubungkan dengan prosedur yang rumit, berbelit-belit, proses administrasi yang membingungkan dan hal-hal yang sejenis dengan itu. Terjadinya hal ini sebagai akibat birokrasi berjalan tidak seperti tujuan diadakannya. Pada pemahaman birokrasi seperti ini melekat konotasi negatif terhadap birokrasi. Sementara secara denotatif, birokrasi dipahami sebagai sebuah kebutuhan bagi setiap organisasi agar bisa menjalankan program, visi dan misi serta untuk mencapai tujuannya.

Dalam sudut pandangnya, Hegel berpendapat bahwa administrasi negara (birokrasi) sebagai suatu jembatan yang menghubungkan antara negara (pemerintah) dengan masyarakatnya (Thoha;2003). Di antara keduanya itu birokrasi pemerintah merupakan medium yang bisa dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan *particular* (masyarakat) dengan kepentingan *general* (umum).

Sedangkan menurut pandangan Weber birokrasi dianggap sebagai hubungan kolektif bagi golongan pejabat, suatu kelompok tertentu dan berbeda, yang pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat dalam semua jenis organisasi (Albrow, 1989). Pengertian ini menunjukkan bahwa birokrasi bisa menyangkut urusan publik maupun privat. Karena pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat dalam semua organisasi. Dalam organisasi privat pun ada yang dinamakan birokrasi, demikian juga organisasi publik. Pandangan semacam ini ternyata berkembang dan banyak berpengaruh dalam pembicaraan mengenai birokrasi pada beberapa waktu terakhir.

Birokrasi publik memberikan jenis pelayanan publik. Birokrasi memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan kepada seluruh warga negara. Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam pelayanan administratif, pelayanan barang dan pelayanan jasa (<http://tentangpelayananpublik.blogspot.com>). Basis yang menjadi pembeda jenis pelayanan ini adalah menyangkut kepentingan masyarakat secara umum.

Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah dan sebagainya.

Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk / jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya.

Studi tentang perilaku anti korupsi birokrat tidak bisa lepas dari penilaian kinerja birokrasi publik. Namun menilai kinerja birokrasi ini termasuk masih jarang dan sulit dilakukan. Padahal adanya informasi kinerja dapat dijadikan daya dorong untuk memperbaiki kinerja birokrasi. Ada sejumlah hal menjadi penyebab sulitnya menilai kinerja birokrasi publik. Kesulitan penilaian ini tercipta akibat tidak dimilikinya tolok ukur kinerja yang jelas dan mudah (Dwiyanto:2006). Hal ini berbeda dengan organisasi bisnis yang segera bisa tampak setidaknya dari profit yang dihasilkan. Kondisi di atas mendorong pemerintah memperlakukan birokrasi dalam pemberian anggaran tidak ada kaitannya dengan kinerja birokrasi.

Anggaran yang diberikan lebih ditentukan oleh kebutuhan bukan oleh hasil yang diberikan oleh birokrasi pada masyarakatnya. Padahal upaya mengaitkan anggaran yang diterima oleh birokrasi publik dengan hasil atau kinerja bisa menjadi salah satu faktor pendorong perbaikan kinerja birokrasi.

Dari anggaran inilah salah satu peluang korupsi terbuka. Penggunaan anggaran memang telah ada aturan mainnya, tetapi aturan ini sangat berpotensi untuk dilanggar. Masih terdapat celah-celah aturan yang tidak dengan mudah dan cepat untuk diketahui. Uang menjadi daya tarik yang tak pernah usang bagi manusia untuk meraihnya termasuk dengan cara-cara yang tidak di benarkan secara hukum.

Berbagai faktor lain yang menyebabkan kesulitan penilaian terhadap birokrasi publik adalah kompleksitas indikator kinerja yang digunakan. Selain indikator efisiensi dan efektivitas, harus dilihat juga indikator yang melekat pada pengguna seperti kepuasan pelanggan, akuntabilitas dan responsivitas sebagai jawaban atas kewenangan monopolis birokrasi dari alternatif sumber pelayanan publik. Demikian juga dengan misi dan tujuan birokrasi publik yang kabur dan bersifat multidimensional (Dwiyanto:2006).

Kesulitan yang ada tersebut menjadi daya dorong terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang terkait dengan kinerja birokrasi. Proses penilaian membutuhkan pemahaman dan kecermatan yang tinggi. Dibutuhkan sumber daya yang mumpuni untuk bisa melakukan penilaian seperti ini.

B. Perilaku antikorupsi

Apakah yang dimaksud dengan perilaku? Antikorupsi yang dimaksud memiliki pengertian apa? Kemudian perilaku antikorupsi yang bagaimana yang dapat dilihat dalam studi ini? Sejumlah pertanyaan tersebut merupakan konsep yang akan dijelaskan pada bagian ini.

Perilaku memiliki persamaan dengan kata kelakuan, sepak-terjang, temperamen, sifat dan sikap. Definisi perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap. Karena kedua wujud itu perilaku tidak saja di lihat dari badan atau ucapan individu.

Prilaku pada dasarnya terbentuk setelah melewati keseluruhan dari aktivitas, yaitu unsur kepentingan, kebutuhan, motivasi dan sikap yang potensial dapat menjelaskan perilaku tertentu (Atbar, 2012). Oleh karena itu, kepentingan seseorang melandasi prilaku atau dengan kata lain prilaku seseorang itu banyak dipengaruhi oleh kepentingannya. Seorang pegawai melakukan tindakan korupsi atau sebaliknya sangat ditentukan oleh kepentingannya. Namun tentu saja seseorang bisa melakukan sesuatu dipengaruhi oleh berbagai faktor

Dapat dikatakan bahwa perilaku seseorang tidak saja dipengaruhi oleh faktor eksternal yang merupakan respon spontan terhadap kondisi tertentu. Perilaku seseorang dilakukan karena adanya kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan, pengalaman dan reaksi terhadap sesuatu.

Memahami perilaku manusia merupakan titik pangkal untuk dapat mengerti perilakunya dalam organisasi. Dengan kata lain memahami perilaku anti korupsi birokrasi dapat dilakukan dengan melihat perilaku para birokratnya. Perilaku tersebut ditentukan oleh proses masukan dan keluarannya. Hal ini berarti harus menganggap bahwa perilaku manusia adalah sebagai suatu sistem yang terbuka, bukan sesuatu yang dapat diisolasi dan manusia berintegrasi dengan lingkungannya serta hidup dalam lingkungannya. Atau perilaku manusia itu dapat dilihat dalam tata kehidupan masyarakat mulai dari faktor luar yang mempengaruhinya hingga apa yang dapat dirasa oleh panca indra orang lain yang melihatnya.

Definisi dari perilaku korupsi sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam pasal ini dijelaskan pelaku korupsi bisa satu orang (diri sendiri), dua (diri dan orang lain) atau lebih dari dua orang (suatu korporasi). Jumlah pelaku penting artinya dalam memahami makna perilaku korupsi. Semakin banyak pelaku yang terlibat dalam korupsi kian rumit tindak pidana korupsi itu untuk diberantas.

Korupsi juga bisa dilihat dari cara melakukannya dan posisi pelaku. Hal ini bisa dilihat pada pasal 3 yang menyatakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara harta hasil dari tindak pidana korupsi sendiri bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh di antaranya dari tindak pidana korupsi dan penyuapan

Korupsi melibatkan sejumlah pihak yang saling berkaitan satu sama lain. Keterkaitan tersebut bisa dilihat dari makna korupsi dan tindakan korup berikut. Pertama, korupsi adalah perilaku menyimpang yang memanifestasikan diri dalam penyalahgunaan suatu fungsi yang diamanatkan oleh orang lain atau institusi (Rabl,2011). Fungsi dalam penelitian ini dilihat pada kewenangan birokrat aturan kerja dan pelaksanaan program-program kerja pegawai.

Kedua, penyalahgunaan fungsi ini terjadi atas inisiatif seseorang atau orang lain dalam rangka untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi pihak ketiga. Korupsi tidak hanya menyangkut diri seseorang tetapi bisa melibatkan orang lain. Bahkan dapat menimpa pihak yang tidak berinisiatif untuk korupsi, namun menerima bagian yang sudah jadi.

Ketiga, korupsi terjadi sebagai pertukaran keuntungan dan imbalan antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan yang bersifat korup. Dalam tindakan yang korup pelayanan dianggap sebagai keuntungan bagi pihak terlayani. Pelayanan tidak dipahami dalam konteks kewajiban yang sudah seharusnya diterima oleh publik. Meski dengan alasan yang bersifat ekonomis, hitung-hitungan ini sebenarnya tidak mendasar. Sebab rakyat sudah membayar pajak sebelum mereka menerima pelayanan. Pajak itulah yang salah satunya digunakan untuk mengaji para pegawai Negara itu. Permintaan imbalan berarti publik harus mengalami dua kali bayar untuk sebuah pelayanan.

Keempat, korupsi menghasilkan kerusakan atau kerugian politik, masyarakat, atau ekonomi. Dengan korupsi tatanan kehidupan masyarakat menjadi kacau. Dalam tatanan korup masyarakat yang taat aturan menjadi pihak yang aneh, tak terlayani dan dikucilkan dari percaturan pelayanan publik. Contohnya, korupsi akan menghilangkan budaya antri, karena orang yang patuh pada urutan antrian akan tersingkirkan orang yang memakai jalur pintas dengan imbalannya. Orang yang taat aturan menjadi tersisih dan tak berharga di mata para koruptor dan penyuap.

Kelima, Perbuatan korup terjaga kerahasiaannya di dalam suatu kesepakatan yang saling menguntungkan dan bersahabat. Korupsi menjadi rahasia umum. Publik tahu tetapi susah untuk mengungkapkannya. Hal ini diperkuat dengan selubung perkataan para birokrat, pejabat dan politisi yang dibungkus sedemikian rapi seolah semua bersih berpihak kepada rakyat.

Dengan mengobinasi dua pengertian di atas perilaku anti korupsi memiliki pengertian tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap untuk menolak perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan yang berlawanan dengan pengertian korupsi di atas berarti termasuk perbuatan anti korupsi. Individu yang memberikan tanggapan atau reaksi menerima perbuatan yang berlawanan dengan pengertian korupsi berarti memiliki perilaku anti korupsi. Perbuatan yang berlawanan dengan pengertian korupsi memiliki sejumlah prinsip. Prinsip inilah yang menjadi konsep-konsep yang menjadi bagian dari perilaku anti korupsi. Agar lebih bisa dikenal dengan mudah dalam praktek maka konsep-konsep tersebut didukung dengan indikator-indikator perbuatan anti korupsi birokrasi.

Dalam perlawanan terhadap korupsi selain penindakan terhadap koruptor masih ada hal yang tak kalah penting yang perlu dilakukan bersifat preventif dan diperlukan selamanya yakni perilaku anti korupsi. Penting karena dengan perilaku ini korupsi tidak saja ditindak setelah terjadi, melainkan perilaku anti korupsi ini bisa meniadakan korupsi itu sendiri. Artinya perilaku anti korupsi ada maka korupsi tidak ada. Sehingga penting untuk menjalankan, melestarikan dan membiasakan perilaku anti korupsi, terutama pada birokrasi pemerintahan.

Bentuk perilaku anti korupsi sendiri telah ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam Inpres itu birokrasi diinstruksikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar.

Pentingnya peran perilaku anti korupsi telah dituangkan dalam Instruksi Presiden. Perilaku anti korupsi secara khusus menjadi salah satu strategi dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Perilaku ini dalam Inpres Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 termasuk dalam perintah kepada para

pejabat negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Pada Inpres tersebut dikemukakan bahwa dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana tersebut di atas berpedoman pada strategi-strategi yang meliputi :

1. Strategi Pencegahan;
2. Strategi Penegakan Hukum;
3. Strategi Peraturan Perundang-Undangan;
4. Strategi Kerjasama Internasional dan Penyelamatan Aset Hasil Korupsi;
5. Strategi Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi;
6. Strategi Mekanisme Pelaporan.

Sayangnya strategi ke lima pendidikan dan budaya anti korupsi ini kurang populer. Strategi ini gaungnya masih kalah oleh strategi penindakan terhadap para birokrat yang sudah terlanjur melakukan korupsi. Perlu upaya untuk lebih meningkatkan strategi anti korupsi di lebih menyebar luas di kalangan birokrasi dan masyarakat.

Agar tujuan diatas tercapai maka perilaku anti korupsi harus dikenal secara luas oleh masyarakat. Ada tiga prinsip anti korupsi yang bisa dijumpai praktek pemeritahan (www.mebermutu.org). Kesatu, akuntabilitas. Dalam istilah akuntabilitas melekat makna hitung atau terhitung. Birokrasi melaksanakan tugasnya dengan tolok ukur yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas ini berada di bawah tuntutan akuntabilitas kerja. Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja.

Semua lembaga bertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga. Akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

Prinsip anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*).

Transparansi amat dibutuhkan di bidang anggaran, meskipun transparansi dibutuhkan untuk semua bidang. Namun korupsi lebih disebabkan karena faktor uang. Transparansi di bidang anggaran dan pelayanan publik meliputi berbagai bidang. Keterlibatan publik akan menentukan terjaminnya kinerja pemerintah memenuhi sifat keterbukaan. Ada sejumlah proses yang bisa mendukung transparansi.

Proses penganggaran yang bersifat *bottom up*, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran.

Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal ini terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja).

Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis.

Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap *out put* kerja-kerja pembangunan

Prinsip anti korupsi ketiga adalah kewajaran. Prinsip *fairness* ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran lainnya.

Kewajaran diwujudkan dengan beberapa langkah. Ada setidaknya lima langkah penegakan prinsip *fairness*. Pertama, komprehensif dan disiplin yang mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas (*off budget*). Kedua, fleksibilitas yang ditandai dengan adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektifitas.

Ketiga, terprediksi yakni ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas *value for money* dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan.

Keempat, kejujuran adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Sehingga kejujuran merupakan bagian pokok dari prinsip *fairness*. Informatif merupakan langkah menegakkan kewajaran yang menuntut adanya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran dan proses pengambilan keputusan. Sifat informatif - ciri khas dari kejujuran.

Sikap anti korupsi merupakan hal penting sekaligus berat dalam melawan korupsi. Penting karena perilaku korupsi sangat tergantung pada sikap seseorang akan perilaku korup. Korupsi bisa terjadi akibat seseorang memang serakah ingin memperoleh keuntungan dengan cara yang korup, tetapi bisa juga menimpa seseorang karena tidak mampu menolak perilaku korup yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain ini bisa berasal dari rekan kerja atau pihak yang memberi sesuatu.

Meski pernah ada kajian bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara korupsi dengan tingkat pendidikan, namun terdapat kecenderungan bahwa indeks korupsi paling tinggi dilakukan oleh mereka yang bergelar Master atau lebih tinggi (www.pusbangsitek.com). Tetapi banyak pejabat dalam taraf pendidikan tersebut yang rata-rata menjadi atasan dalam tataran memberi persetujuan dan tidak kuasa menolak perilaku korup bawahannya. Mereka ini kebanyakan hanya menerima jatah yang sudah diatur oleh bawahannya.

Ada dua hal yang harus dikuasai oleh seorang atasan dalam menghadapi bawahan yang korup. Pertama, ia harus mengetahui betul aturan yang diberlakukan dalam teknis pelaksanaan tugas jabatan yang menyangkut diri dan bawahannya. Secara detail atasan dituntut mengetahuinya sehingga bisa mendeteksi peluang-peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Kedua, atasan dituntut memiliki mental baja dan keberanian yang besar untuk menolak tindakan-tindakan korup bawahannya. Banyak kejadian seorang atasan tidak disukai bahkan dikucilkan oleh sekelompok bawahannya akibat tidak mau menerima bagian atas hasil korupsi. Atasan juga bisa tidak didukung karena semua program kerjanya diberi syarat bersih dari perilaku korup.

Sikap anti korupsi bisa terkikis oleh beberapa upaya yang dibuat oleh para pihak yang terlibat korupsi untuk melemahkan kriteria tindakan korup. Ada beberapa aspek yang melemahkan kriteria korupsi. Pertama, sisi jumlah benda, fasilitas atau uang yang diterima

atau diberikan. Para terkait perilaku korup akan beranggapan bahwa jumlah sedikit tidak termasuk korupsi. Maka muncul istilah semacam uang transport, ongkos jalan dan pengganti konsumsi diberikan bukanlah termasuk korupsi.

Kedua, sisi alasan memberikan atau menerima barang, uang atau fasilitas. Dalih iklas memberikan dan tidak terkait dengan kebijakan menjadi rayuan agar pemberian seseorang diterima. Ketiga sisi waktu pemberian atau penerimaan. Pelaku korupsi biasanya mendilay waktu dengan tidak memberikan imbalan pada waktu pelayanan atau proyek diberikan. Tetapi mengambil jarak agar perbuatannya tersamar atau tidak termasuk kategori korupsi.

Semakin tinggi upaya memanfaatkan berbagai sisi tersebut maka bagi pelaku akan memiliki anggapan semakin lemah kriteria sebuah perilaku dianggap korup atau tidak. Lemahnya anggapan ini dapat berdampak terhadap sikap permisif terhadap perilaku korupsi.

Secara legal formal pemberantasan korupsi menghendaki Peran Serta Masyarakat. Dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menghendaki peran masyarakat tersebut. Pada ayat (1) disebutkan masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Walaupun hanya disebutkan dapat yang mengandung makna opsional bisa membantu atau tidak, tetapi dibuka harapan atau peluang peran serta itu.

Demikian juga telah disebutkan bentuk peran serta dipaparkan pada ayat (2) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

- a) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b) hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c) hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d) hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menghendaki peran serta masyarakat. Dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggungjawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih. Keterlibatan masyarakat dibutuhkan oleh negara. Keterlibatan itu berbentuk hak dan kewajiban yang bermakna sebagai peran yang sangat penting, lengkap dan mendalam. Berbeda apabila peran itu hanya berupa salah satu segi saja semisal hak atau kewajiban saja.

Sementara pada ayat (2) diungkapkan bahwa hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara. Upaya untuk membangun hubungan dengan penyelenggara negara sudah dijelaskan patokannya yakni asas-asas umum penyelenggaraan negara. Sehingga aparatur negara tidak dibenarkan melakukan tugas dan fungsinya melanggar asas-asas umum tersebut. Demikian juga dengan masyarakat dalam berhubungan dengan aparatur negara harus berpegang pada asas-asas umum penyelenggaraan negara tadi. Bila salah satu diantara kedua pihak itu melakukan hal yang tidak sesuai maka perlu dikoreksi atau diluruskan. Cara ini penting agar ada ukuran dalam melihat perilaku aparatur negara oleh masyarakat.

Adapun Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam pasal 3 meliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Kriteria asas penyelenggaraan negara ini dapat digunakan sebagai alat untuk melihat perilaku anti korupsi birokrat. Aparat birokrasi seharusnya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan asas umum tersebut. Dalam pelaksanaannya di lapangan masyarakat dapat melihat, merasakan dan berpendapat tentang perilaku birokrat pada saat memperoleh pelayanan.

Praktek korupsi sudah bersifat sistemik sehingga menjadi virus yang sudah merajalela di semua sektor. Berbagai cara untuk mencegah dan memerangnya diupayakan, termasuk menggunakan institusi pendidikan, seperti sekolah dan perguruan tinggi. Institusi pendidikan diyakini sebagai tempat terbaik untuk menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Murid atau mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa di masa mendatang sejak dini harus diajar dan dididik untuk membenci serta menjauhi praktek korupsi. Bahkan lebih dari itu, diharapkan dapat turut aktif memerangnya. Untuk itu, strategi yang umumnya dipilih dengan mengintervensi secara tidak langsung proses belajar-mengajar melalui penerapan kurikulum antikorupsi. Setidaknya ada tiga perguruan tinggi yang sedang mengembangkan kurikulum tersebut, di antaranya Universitas Islam Negeri, Ciputat; Universitas Katolik Soegipranata, Semarang; serta IAIN Arraniry, Banda Aceh (www.antikorupsi.org).

Munculnya terobosan-terobosan baru untuk melawan praktek korupsi, seperti membuat kurikulum antikorupsi, mesti disambut positif. Namun, apabila akan diimplementasikan dalam lingkup luas, ada beberapa faktor yang mesti dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Sebab, institusi pendidikan seperti sekolah sangat sensitif, perubahan kebijakan walau kecil, akan berpengaruh pada banyak hal.

C. Persepsi

Dalam sub ini akan diuraikan tentang konsep persepsi. Pengertian persepsi yaitu suatu proses penggunaan pengetahuan yang dimiliki (yang disimpan dalam ingatan) untuk mendeteksi atau memperoleh dan menginterpretasi stimulus (rangsangan) yang diterima oleh alat indera seperti mata, telinga dan hidung.(Suharnan, 2005). Karena merupakan stimulus maka persepsi bisa merangsang seseorang untuk bersikap atau berperilaku.

Secara lebih spesifik proses dalam persepsi di atas terdiri dari mengorganisasikan dan menafsirkan (menginterpretasi) kesan indra agar memberikan makna bagi individu dan lingkungannya (Simbolon, 2008). Mengorganisasi memiliki arti menata, menghubungkan dan mengurutkan kesan yang diperoleh. Perilaku anti korupsi tidak bersifat tunggal. Perilaku itu terdiri dari banyak unsur dan bagian. Persepsi merupakan upaya untuk menyusun sejumlah unsur tersebut untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Demikian juga pengetahuan itu menuntut interpretasi atau penafsiran bahwa perilaku tertentu dipahami sebagai anti korupsi. Seberapa tinggi tingkat interpretasi akan

menentukan pemahaman seseorang. Pemahaman ini akan berpengaruh terhadap sikapnya mengenai perilaku yang diinterpretasi.

Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan.

Persepsi juga bisa dipahami dalam sudut pandang lain yakni merupakan proses psikologis dan hasil dari penginderaan serta proses terakhir dari kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir. Persepsi akan timbul pada saat manusia berinteraksi dengan pihak lain. Setiap interaksi yang terjadi akan menimbulkan persepsi. Hal ini terjadi karena dalam interaksi tersebut diterima (<http://adriansyahnantu.wordpress.com>).

Sebenarnya, stimuli itu dapat dibedakan menjadi dua tipe. Tipe pertama adalah stimuli fisik (*physical stimuli*) yang datang dari lingkungan sekitar. Tipe kedua adalah stimuli yang berasal dari dalam si individu itu sendiri dalam bentuk predisposisi, seperti harapan (*expectation*), motivasi (*motivation*), dan pembelajaran (*learning*) yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya (<http://adriansyahnantu.wordpress.com>).

Kombinasi keduanya menghasilkan gambaran yang bersifat pribadi. Karena manusia merupakan entitas yang unik, dengan pengalaman, keinginan, kebutuhan, hasrat dan pengharapan yang unik, akibatnya persepsi juga unik.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode survei dan analisis dalam bentuk interpretasi kritis. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan informasi dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada mahasiswa yang menempuh mata kuliah IPEM4430 Etika Pemerintahan pada masa akademik 2013.

Sesuai dengan survei pada umumnya penelitian ini mempunyai tujuan menampilkan persepsi mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi sebuah informasi. Mahasiswa memiliki persepsi terhadap sikap anti korupsi. Persepsi ini penting bagi berhasil atau tidaknya negara ini menekan tindak pidana korupsi. Tujuan survey ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai persepsi tersebut. Dimana informasi yang disajikan mungkin saja dibutuhkan oleh orang maupun pihak lain yang sedang mempelajari masalah tindak pidana korupsi. Selain itu survei ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi.

A. Pengumpulan data

Data primer dikumpulkan dari mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Terbuka yang mengikuti kuliah Etika Pemerintahan secara sampel melalui kuisisioner. Cara pengumpulan informasi melalui kuisisioner terkirim (*mailed questionnaire*). Bentuk surat (*mail-questionnaire*) merupakan cara untuk menguji tanggapan responden melalui pengiriman kuisisioner via email. Kuisisioner ini dikirimkan dalam bentuk kuis/tugas pertama dalam perkuliahan Etika Pemerintahan.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jawaban yang terkirim. Sedangkan sampel akan diambil dari populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan adalah cara penarikan sampel acak sederhana (*simple random sampling*). Cara ini ditempuh mengingat anggota populasi bersifat homogen (Sugiono,2010). Anggota populasi homogen karena merupakan mahasiswa pada program studi yang sama dan menempuh mata kuliah yang sama.

Penentuan jumlah sampel menggunakan cara yang dikembangkan Isaac dan Michael (Sugiyono, 2010). Cara ini digunakan untuk kesalahan 1 % dengan rumus sebagai berikut :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

s = jumlah sampel, λ^2 dengan dk = 1, P=Q= 0,5, d = 0,05

Selain data primer penelitian ini juga dilengkapi data sekunder dengan mempelajari buku-buku atau bahan-bahan yang berhubungan dengan konsep-konsep perilaku anti korupsi. Bahan-bahan tersebut termasuk di dalamnya dokumen, buku, karya ilmiah, majalah, dan buku bacaan yang lain yang berhubungan konsep dan variabel dalam penelitian ini.

Kuisisioner ini dilengkapi dengan isian identitas demografi dan status mahasiswa. Kelengkapan ini bertujuan untuk menjaga validitas data. Jawaban yang dikirim benar berasal dari mahasiswa yang bersangkutan bukan diisi oleh orang lain.

Pengambilan data melalui email ini dipilih dengan motivasi pemanfaatan teknologi dan sejumlah kelebihan yang dimiliki. Kelebihan dari *mail-questionnaire* adalah hemat biaya, hemat waktu, responden bisa memilih waktu yang tepat baginya untuk mengisi kuesioner, ada jaminan kerahasiaan (*anonymity*) yang lebih besar, keseragaman kata (tidak dibacakan lagi), tidak ada bias pewawancara, serta banyak responden yang dapat dicapai (dibandingkan dengan pengiriman wawancara ke banyak tempat).

B. Analisis Data

Penelitian ini akan bersifat menjelaskan suatu fenomena perilaku anti korupsi. Fenomena yang akan dijelaskan menyangkut konsep tentang birokrasi di Indonesia, kejahatan korupsi, posisi mahasiswa di tengah-tengah kehidupan bangsa dan perilaku anti korupsi dalam birokrasi. Penjelasan kemudian dilanjutkan dengan persepsi mahasiswa tentang perilaku anti korupsi para pejabat negara yang tercermin dalam jawaban atas pertanyaan yang diberikan.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan Skala Likert. Skala tersebut merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei (www.wikipedia.com). Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Dalam survei ini disediakan pertanyaan dengan pada setiap pertanyaan diajukan lima pilihan skala dengan format Sangat tidak setuju; Tidak setuju;

Netral; Setuju; Sangat setuju. Jawaban akan diberikan skor mulai dari 1 hingga 5. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan korelasi product momen

Sebelum penjelasan persepsi di atas dilakukan, informasi mengenai perilaku anti korupsi harus dikumpulkan terlebih dahulu baru diuraikan. Penelitian ini akan mengukur persepsi mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi birokrat, maka akan ditentukan variabel-variabel yang menjadi ukuran perilaku anti korupsi yang harus dipersepsi tersebut. Dengan indikator tersebut menjadi pijakan untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan dan pertanyaan. Cara responden menjawab menggunakan bentuk checklist dengan cara menyilang angka (skor) yang sesuai dengan jawaban mereka. Berdasar data tersebut dicari stakeholder yang menjawab sangat setuju dan setuju atau mereka yang menjawab tidak setuju atau sangat tidak setuju. Kesimpulan dari bentuk jawaban mayoritas akan dijadikan dasar dalam menjawab hipotesis penelitian. Analisis data penelitian ini menggunakan statistic deskriptif karena ingin menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Akhir dari penelitian ini bertujuan untuk mencari kesimpulan mengenai persepsi mahasiswa. Penarikan kesimpulan juga dilakukan terhadap norma-norma atau kriteria-kriteria yang berlaku dalam perilaku anti korupsi pada para pejabat negara.

C. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H0 : Persepsi mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi birokrasi lemah

H1 : Persepsi mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi birokrasi kuat

PETA PENELITIAN

DIMENSI	VARIABEL	SUMBER DATA & INSTRUMEN
Akuntabilitas	Aturan Pertanggungjawaban Pelaporan	Dokumen Kuisisioner
Transparansi	Keterbukaan Kejujuran Menjunjung tinggi kepercayaan (<i>trust</i>).	Dokumen Kuisisioner
Kewajaran	Komprehensif Disiplin Fleksibilitas Terprediksi Kejujuran Informatif	Dokumen Kuisisioner

D. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

ANGGARAN BIAYA PENELITIAN PERSEPSI MAHASISWA JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNIVERSITAS TERBUKA TERHADAP PERILAKU ANTI KORUPSI BIROKRASI

No	Kegiatan	Volume	Satuan (Unit)	Biaya Satuan	Jumlah (Rp)
1	Gaji dan upah (Maks. 20%) Honor 2 Peneliti	2 Org	1 Thn	2.000.000 1.000.000	3.000.000
2	Bahan habis pakai dan peralatan (40-60%) Bahan Penunjang Bahan Habis Pakai		1 Thn	3.800.000 1.800.000	7.100.000
3	Perjalanan (Maks. 15%)	2 Org	2 Bln	1.500.000	2.500.000
4	Lain-lain (publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan) (10-15%) Penyusunan dan penggandaan laporan, Seminar hasil penelitian Penulisan hasil penelitian		3 Bln 6 Bln	2.250.000	2.400.000
Jumlah					15.000.000

JADWAL PENELITIAN
PERSEPSI MAHASISWA JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP
UNIVERSITAS TERBUKA
TERHADAP PERILAKU ANTI KORUPSI BIROKRASI

No	Tahapan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan											
		Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Persiapan												
1	Penyusunan proposal												
2	Pengurusan ijin penelitian												
B	Pelaksanaan												
4	Koordinasi dengan Instansi terkait												
5	Inventarisasi Data												
6	Penyusunan Laporan Penelitian												
C	Pelaporan dan Evaluasi												
7	Editing/ Perbaikan Draft												
8	Penggandaan												
9	Pelaporan												
10	Evaluasi												

BAB. IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Pada bagian ini akan dipaparkan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan. Di sini juga akan diberikan deskripsi dan catatan-catatan terkait dengan pengumpulan data hingga berbagai hal dan kecenderungan yang dijumpai di lapangan terkait dengan kepentingan penelitian. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 29 mahasiswa. Hal ini ditentukan berdasarkan penentuan sampel Isaac dan Michael untuk tingkat kesalahan 1 % (Lampiran a)

Di bawah ini ditampilkan paparan jawaban responden atas pertanyaan dan pernyataan terkait dengan variabel penelitian. Data tersebut berupa demografi responden, persepsi tentang akuntabilitas, transparansi dan kewajaran pelayanan birokrasi.

1.A. Data Demografi

Sebelum diajukan pertanyaan dan pernyataan dari substansi penelitian kepada mahasiswa diajukan isian data terkait identitas responden dan frekuensi interaksi dengan birokrasi. Walaupun tidak semua responden menjawab isian ini, namun data yang berhasil direkam ditampilkan berikut. Data tentang Jenis Kelamin responden ini menunjukkan jumlah 15 laki-laki dan 3 wanita. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden berada pada kelompok jenis kelamin laki-laki. Sedangkan Usia responden menunjukkan data sebanyak 14 orang berusia antara 21-30 tahun dan 5 berusia 31-40 tahun.

Pekerjaan /profesi para selain sebagai mahasiswa tercatat 1 orang TNI/POLRI, 10 orang PNS dan 2 berprofesi lainnya. Hal ini terkait dengan jenis input mahasiswa UT yang relatif bervariasi. Sedangkan UPBJJ-UT asal dari mahasiswa tercatat data masuk 3 dari Padang, Pontianak 2 orang, Batam 4, Banda Aceh 1, Serang 2, Pangkalpinang 3, Kupang 1, Palangkaraya 1, Makassar 1, Sibolga 1, Samarinda 2, Semarang 1, Pekanbaru 1, Purwokerto 1. Terkait dengan frekuensi mahasiswa berinteraksi dengan birokrasi diperoleh data bahwa jarang (1 kali dalam 6-12 bulan) mendapat 5 jawaban, sering (1 kali dalam 1-5 bulan) dijawab 6 orang, sangat sering (lebih 1 kali setiap bulan) mendapat 6 jawaban. Sementara tidak pernah tidak mendapat jawaban.

1.B. Data Riset Mengenai Akuntabilitas

Dibawah ini ditampilkan paparan jawaban persepsi terkait akuntabilitas. Pertama, persepsi terhadap akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan

kerja. Kedua, persepsi terhadap semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga. Persepsi ketiga, yakni Persepsi terhadap akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Keempat, persepsi terhadap evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan

Dalam mengetahui persepsi terhadap akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja diperoleh data yang dapat diuraikan secara lebih rinci di bawah ini. Parameter yang dipakai dalam menggali persepsi tentang kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja ini berupa tiga pertanyaan penelitian yang diberi kode B1, B2 dan B3. Dari pertanyaan yang diajukan diperoleh jawaban sebagai berikut :

Gradasi jawaban	B1	B2	B3
SS	2	3	2
S	6	7	14
BS	9	10	8
TS	11	7	4
STS	1	2	1
JUMLAH	29	29	29

Tabel 1 Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang persepsi terhadap akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa persepsi dari pernyataan B1 mengenai para pegawai yang dilihat/kenal oleh mahasiswa selalu datang tepat waktu (tidak terlambat) untuk masuk kerja, ternyata memperoleh tanggapan jawaban sebanyak dua orang sangat setuju, enam menjawab setuju, sembilan biasa saja, sebelas orang tidak setuju dan satu sangat tidak setuju.

Sedangkan pernyataan B 2 bahwa para pegawai yang saya lihat/kenal selalu pulang tepat waktu (tidak membolos) dalam meninggalkan kantor dijawab sangat setuju hanya 3 orang, setuju tujuh orang, biasa saja 10 orang, tidak setuju juga 7 orang dan sangat tidak setuju dijawab oleh 2 mahasiswa.

Demikian pula persepsi dari pernyataan B3 bahwa pegawai melaksanakan tugasnya selalu berdasar pada prosedur dan aturan mendapat tanggapan berupa jawaban sangat setuju sebanyak 2, menjawab setuju 14 orang, menyatakan biasa saja 8, tidak setuju 4 responden dan sangat tidak setuju sebanyak 1 mahasiswa.

Sedangkan untuk persepsi kedua yaitu persepsi terhadap semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga data diuraikan masing-masing uraian di bawah ini. Pertanyaan untuk mengungkap persepsi kinerja lembaga ini diberikan kode B4, B5, B6 dan B7. Masing-masing pertanyaan memperoleh jawaban diuraikan dibawah ini berdasarkan tabel berikut :

Gradasi jawaban	B4	B5	B6	B7
SS	3	4	2	1
S	9	9	15	11
BS	12	12	10	13
TS	4	3	2	3
STS	1			1
JUMLAH	29	28	29	29

Tabel 2. Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang persepsi terhadap akuntabilitas mengacu semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendapat sangat setuju ada 3 jawaban, setuju diberikan oleh 9 responden, biasa saja menurut 12 mahasiswa, tidak setuju 4 orang dan sangat tidak setuju hanya 1 orang ketika diajukan pernyataan B4 bahwa para pegawai bekerja dengan sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan dengan penuh kesadaran ada atau tidak ada pengawasan atasan.

Sebanyak 4 orang sangat setuju, 9 orang menjawab setuju 12 lainnya menyatakan biasa saja, 3 orang berpendapat tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju pada saat mahasiswa dihadapkan pada pernyataan B5 bahwa para pegawai yang dijumpainya bekerja dengan baik dan bertanggung jawab dijadikan kebanggaan atau gaya hidup bagi semua pegawai.

Sedangkan sebanyak 2 orang sangat setuju, 15 orang menjawab setuju 10 lainnya menyatakan biasa saja, 2 orang berpendapat tidak setuju dan tidak ada yang menjawab

sangat tidak setuju apabila mahasiswa disodori pernyataan B6 bahwa para pegawai sangat tahu aturan kerjanya dan konsekuen menegakkannya

Demikian juga pendapat yang menyatakan sangat setuju ada 1 jawaban, setuju diberikan oleh 11 responden, biasa saja menurut 13 mahasiswa, tidak setuju 3 orang dan sangat tidak setuju hanya 1 orang menjawab pernyataan B7 jika melanggar aturan, pegawai merasa sungkan dengan teman-teman sejawatnya. Dalam pandangan mahasiswa pernyataan itu disikapi dengan jawaban.

Persepsi terhadap akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan dipersepsi oleh mahasiswa dengan gambaran pemberian jawaban atas pertanyaan tersebut. Dengan kode pertanyaan penelitian B8, B9 dan B 10 dapat ditampilkan data yang diperoleh pada tabel beserta penjelesannya sebagai berikut :

Gradasi jawaban	B8	B9	B10
SS	5	4	4
S	13	9	12
BS	4	10	9
TS	6	4	4
STS	1	2	
JUMLAH	29	29	29

Tabel 3. Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang persepsi terhadap akuntabilitas mengacu ukuran pertanggungjawaban melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa persepsi dari pertanyaan B8 terkait dapat mengetahui dengan mudah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pegawai melalui mekanisme pelaporan, ternyata memperoleh tanggapan jawaban sebanyak lima orang sangat setuju, 13 menjawab setuju, empat biasa saja, juga enam orang tidak setuju dan satu sangat tidak setuju.

Sementara pernyataan B9 mengkonfirmasi bahwa mahasiswa dapat memberikan penilaian atas pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pegawai atau tidak. Pernyataan ini dijawab sangat setuju hanya 4 orang, setuju sembilan orang, biasa saja 10 orang, tidak setuju 4 orang dan sangat tidak setuju dijawab oleh 2 mahasiswa.

Demikian juga pendapat yang menyatakan sangat setuju ada 4 jawaban, setuju diberikan oleh 12 responden, biasa saja menurut 9 mahasiswa, tidak setuju 4 orang dan tak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju pada saat dihadapkan pada pernyataan B 10 yang menyatakan bahwa ukuran pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pegawai cukup tinggi.

Kode pertanyaan penelitian B11, B12 dan B 13 yang ditampilkan berikutnya merupakan data yang diperoleh untuk mengetahui persepsi keempat terkait akuntabilitas. Gambaran data yang diperoleh itu mengenai persepsi terhadap evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan diperlihatkan pada tabel di bawah ini dan selanjutnya diuraikan pada penjelasan.

Gradasi jawaban	B11	B12	B13
SS	3	14	14
S	15	11	11
BS	8	2	3
TS	3	2	1
STS			
JUMLAH	29	29	29

Tabel 4. Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang persepsi terhadap akuntabilitas mengacu pada evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa persepsi dari pernyataan B11 yang diungkapkan pada mahasiswa yang berbunyi Anda selalu merasakan manfaat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang kegiatan pelayanan para pegawai pemerintah. Pernyataan tersebut ternyata memperoleh tanggapan jawaban sebanyak tiga orang sangat setuju, lima belas menjawab setuju, delapan biasa saja, tiga orang tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Sebanyak 14 orang sangat setuju, 11 orang menjawab setuju 2 lainnya menyatakan biasa saja, 2 orang berpendapat tidak setuju dan tidak ada jawaban sangat tidak setuju apabila mahasiswa dihadapkan pada pernyataan B12 bahwa program dan pelayanan yang manfaatnya kurang dirasakan segera diperbaiki.

Demikian juga pendapat yang menyatakan sangat setuju ada 14 jawaban, setuju diberikan oleh 11 responden, biasa saja menurut 3 mahasiswa, tidak setuju 1 orang dan tak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju pada saat dihadapkan pada pernyataan B 13 yang menyatakan atasan selalu memberikan peringatan, teguran atau sanksi kepada pegawai yang kinerjanya tidak bagus.

1.C. Data Riset Mengenai Transparansi

Ada tiga persepsi mengenai transparansi yang hendak dilihat dengan menggunakan data penelitian ini. Pertama, persepsi terhadap kontrol kebijakan. Kedua, persepsi terhadap proses penganggaran. Ketiga, persepsi terhadap proses penyusunan dan pembahasan kegiatan atau proyek pembangunan

Gambaran persepsi terhadap kontrol kebijakan diperoleh data yang diuraikan seperti di bawah ini. Ada lima pertanyaan yang diajukan dan diberikan kode pertanyaan C1 hingga C5 sebagaimana tampak pada tabel berikut ini.

Gradasi jawaban	C1	C2	C3	C4	C5
SS	3	2	2	4	6
S	8	16	5	9	11
BS	6	7	11	7	6
TS	10	3	10	8	6
STS	1	1	1	1	
JUMLAH	28	29	29	29	29

Tabel 5. Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang persepsi mengenai transparansi mengacu pada kontrol kebijakan

Tabel di atas menunjukkan bahwa persepsi dari pernyataan C1 terkait persepsi bahwa mahasiswa mudah mengetahui semua proses kebijakan dilakukan dapat dilihat dari jawaban yang diberikan. Pernyataan tersebut ternyata memperoleh tanggapan jawaban sebanyak tiga orang sangat setuju, delapan menjawab setuju, enam biasa saja, sepuluh orang tidak setuju dan hanya satu responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Sementara pernyataan C2 mengkonfirmasi bahwa mahasiswa dapat dengan mudah mengetahui segala bentuk penyimpangan atau tidak. Pernyataan ini dijawab sangat setuju

hanya 2 orang, setuju enam belas, biasa saja 7 orang, tidak setuju 3 orang dan sangat tidak setuju dijawab oleh 1 mahasiswa.

Sebanyak 2 orang sangat setuju, 5 orang menjawab setuju 11 lainnya menyatakan biasa saja, 10 orang berpendapat tidak setuju dan 1 jawaban sangat tidak setuju apabila mahasiswa dihadapkan pada pernyataan C3 bahwa Anda berkesempatan memberi kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.

Sedangkan pernyataan C4 bahwa semua pegawai menjunjung keterbukaan dan kejujuran dijawab sangat setuju hanya 4 orang, sembilan orang setuju, biasa saja 7 orang, tidak setuju 8 orang dan sangat tidak setuju dijawab oleh 1 mahasiswa.

Demikian juga pendapat yang menyatakan sangat setuju ada 6 jawaban, setuju diberikan oleh 11 responden, biasa saja menurut 6 mahasiswa, tidak setuju 6 orang dan tak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju pada saat dihadapkan pada pernyataan C5 yang menyatakan Anda sangat menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*) kepada para pegawai bahwa mereka sungguh-sungguh ingin member pelayanan terbaik pada masyarakat.

Kinerja birokrasi terkait proses penganggaran khususnya persepsi terhadap penganggaran yang bersifat bottom up dipersepsi oleh mahasiswa dengan gambaran pemberian jawaban atas pertanyaan tersebut. Dengan kode pertanyaan penelitian C6, C7 dan C8 dapat ditampilkan data yang diperoleh pada tabel beserta penjelesannya sebagai berikut :

Gradasi jawaban	C6	C7	C8
SS	3	8	8
S	11	13	12
BS	9	3	4
TS	4	4	4
STS	2	1	1
JUMLAH	29	29	29

Tabel 6. Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang persepsi mengenai transparansi mengacu pada penganggaran yang bersifat bottom up

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa persepsi dari pernyataan C6 yang diungkapkan pada mahasiswa yang berbunyi Perencanaan anggaran kegiatan lembaga

pemerintah berdasarkan masukan dari masyarakat. Pernyataan tersebut ternyata memperoleh tanggapan jawaban sebanyak tiga orang sangat setuju, sebelas menjawab setuju, sembilan biasa saja, empat orang tidak setuju dan dua responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Sebanyak 8 orang sangat setuju, 13 orang menjawab setuju 3 lainnya menyatakan biasa saja, 4 orang berpendapat tidak setuju dan 1 jawaban sangat tidak setuju apabila mahasiswa dihadapkan pada pernyataan C7 bahwa penerapan/implementasi anggaran lembaga pemerintah diperuntukkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.

Sementara pernyataan C8 mengkonfirmasi bahwa mahasiswa mengerti masyarakat berhak tahu dengan mudah laporan pertanggungjawaban dan boleh melakukan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Pernyataan ini dijawab sangat setuju hanya 8 orang, setuju 12, biasa saja 4 orang, tidak setuju 4 orang dan sangat tidak setuju dijawab oleh 1 mahasiswa.

Kode pertanyaan penelitian C9 hingga C14 yang ditampilkan berikutnya merupakan data yang diperoleh untuk mengetahui persepsi keempat terkait transparansi. Gambaran data yang diperoleh itu mengenai persepsi terhadap proses penyusunan dan pembahasan kegiatan atau proyek pembangunan diperlihatkan pada tabel di bawah ini dan selanjutnya diuraikan pada penjelasan.

Gradasi jawaban	C9	C10	C11	C12	C13	C14
SS	4	7	10	7	8	11
S	9	16	14	11	12	11
BS	8	2	3	9	3	2
TS	5	2		1	3	4
STS	3	2	2	1	1	1
JAWABAN	29	29	29	29	27	29

Tabel 7. Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang persepsi mengenai transparansi mengacu proses penyusunan dan pembahasan kegiatan atau proyek pembangunan

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendapat sangat setuju ada 4 jawaban, setuju diberikan oleh 9 responden, biasa saja menurut 8 mahasiswa, tidak setuju 5 orang dan sangat tidak setuju 3 orang ketika diajukan pernyataan C9 bahwa mahasiswa dapat mengetahui dengan mudah proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan

(anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja) program pembangunan, pekerjaan di kantor.

Sebanyak 7 orang sangat setuju, 16 orang menjawab setuju 2 lainnya menyatakan biasa saja, 2 orang berpendapat tidak setuju dan hanya 2 sangat tidak setuju pada saat mahasiswa dihadapkan pada pernyataan C10 bahwa pengelolaan proyek senantiasa memperhatikan pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis.

Sedangkan sebanyak 10 orang sangat setuju, 14 orang menjawab setuju 3 lainnya menyatakan biasa saja, tidak ada yang berpendapat tidak setuju dan 2 yang menjawab sangat tidak setuju apabila mahasiswa disodori pernyataan C11 bahwa selalu ada proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sebanyak 7 orang sangat setuju, 11 orang menjawab setuju 9 lainnya menyatakan biasa saja, 1 orang berpendapat tidak setuju dan hanya 1 sangat tidak setuju pada saat mahasiswa dihadapkan pada pernyataan C12 bahwa Selalu ada proses pengawasan yang lebih khusus lagi terhadap proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri.

Pernyataan C13 yang diajukan adalah proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara terbuka. Pernyataan tersebut mendapat jawaban sebanyak 8 orang sangat setuju, 12 orang menjawab setuju 3 lainnya menyatakan biasa saja, 3 orang berpendapat tidak setuju dan 1 mahasiswa yang menjawab sangat tidak setuju

Sedangkan pernyataan C14 terkait persepsi terhadap proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan Pernyataan ini dijawab sangat setuju hanya 11 orang, setuju 11, biasa saja 2 orang, tidak setuju 4 orang dan sangat tidak setuju dijawab oleh 1 mahasiswa.

1.D. Data Riset Mengenai Prinsip Kewajaran

Sedangkan Persepsi terhadap penegakan prinsip kewajaran (fairness) ditunjukkan melalui data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Dengan kode pertanyaan penelitian D1 hingga D11 yang ditampilkan berikutnya merupakan data yang diperoleh untuk mengetahui persepsi keempat terkait transparansi.

Gambaran data yang diperoleh itu mengenai persepsi terhadap langkah penegakan prinsip kewajaran (fairness) diperlihatkan pada tabel di bawah ini dan selanjutnya diuraikan pada penjelasan.

Gradasi jawaban	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
SS	2	3		1		1	1	2	1	3	4
S	11	15	16	15	17	18	17	14	12	18	12
BS	6	6	9	9	9	7	9	9	9	6	9
TS	7	4	3	4	3	3	2	3	7	2	4
STS	3	1									
JUMLAH	29	29	28	29	29	29	29	28	29	29	29

Tabel 8. Jawaban responden terhadap pertanyaan tentang persepsi mengenai kewajaran

Tabel di atas menunjukkan bahwa pendapat sangat setuju ada 2 jawaban, setuju diberikan oleh 11 responden, biasa saja menurut 6 mahasiswa, tidak setuju 7 orang dan sangat tidak setuju 3 orang ketika diajukan pernyataan D1 bahwa mahasiswa Dalam penganggaran tak pernah dijumpai berbagai bentuk penggelembungan dana (*mark up*).

Sebanyak 3 orang sangat setuju, 15 orang menjawab setuju 6 lainnya menyatakan biasa saja, 4 orang berpendapat tidak setuju dan hanya 1 sangat tidak setuju pada saat mahasiswa dihadapkan pada pernyataan D2 bahwa Dalam penganggaran selalu ada upaya untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) maupun ketidakwajaran lainnya.

Sementara D3 merupakan pernyataan tentang pegawai bekerja mempertimbangkan aspek kesinambungan atau keberlanjutan. Pernyataan tersebut mendapat jawaban sebanyak tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat setuju, 16 orang menjawab setuju 9 lainnya menyatakan biasa saja, 3 orang berpendapat tidak setuju dan tak satupun mahasiswa yang menjawab sangat tidak setuju

Sebanyak 1 orang sangat setuju, 15 orang menjawab setuju 9 lainnya menyatakan biasa saja, 4 orang berpendapat tidak setuju dan tak seorangpun yang sangat tidak setuju pada saat mahasiswa dihadapkan pada pernyataan D4 bahwa dalam bekerja pegawai selalu taat pada asas pelayanan terbaik

Sedangkan persepsi berikutnya tidak satupun jawaban sangat setuju, 17 orang menjawab setuju 9 lainnya menyatakan biasa saja, 3 berpendapat tidak setuju dan tak ada yang menjawab sangat tidak setuju apabila mahasiswa disodori pernyataan D5 bahwa Pegawai selalu mengupayakan pengeluaran yang tidak melampaui batas (*off budget*).

Pernyataan D6 adalah pernyataan bahwa dalam melaksanakan program pembangunan/pelayanan selalu ada kebijakan untuk efisiensi dan efektifitas. Pernyataan tersebut ternyata memperoleh tanggapan jawaban sebanyak satu orang sangat setuju, delapan belas menjawab setuju, tujuh biasa saja, tiga orang tidak setuju dan tak satupun responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Sedangkan pernyataan D7 berisi ada jaminan ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas *value for money* dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Pernyataan ini dijawab sangat setuju hanya 1 orang, setuju 17, biasa saja 9 orang, tidak setuju 2 orang dan sangat tidak setuju tidak memperoleh jawaban.

Sebanyak 2 orang sangat setuju, 14 orang menjawab setuju 9 lainnya menyatakan biasa saja, 3 orang berpendapat tidak setuju dan tidak ada jawaban sangat tidak setuju apabila mahasiswa dihadapkan pada pernyataan D8 bahwa dalam proses perencanaan pembangunan selalu menggunakan anggaran yang terprediksi dengan baik

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa pendapat sangat setuju ada 1 jawaban, setuju diberikan oleh 12 responden, biasa saja menurut 9 mahasiswa, tidak setuju 7 orang dan sangat tidak setuju tak memperoleh jawaban ketika diajukan pernyataan D9 Tidak ada bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis.

Demikian juga pendapat yang menyatakan sangat setuju ada 3 jawaban, setuju diberikan oleh 18 responden, biasa saja menurut 6 mahasiswa, tidak setuju 2 orang dan sangat tidak setuju tidak ada yang memilih apabila mahasiswa disodori pernyataan D10 bahwa pada lembaga negara selalu dijumpai sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja

Sementara pernyataan D11 mengkonfirmasi bahwa proses pengambilan keputusan selalu berdasarkan prinsip kejujuran. Pernyataan ini dijawab sangat setuju hanya 4 orang, setuju dua belas orang, biasa saja 9 orang, tidak setuju 4 orang dan tidak ada mahasiswa sangat tidak setuju.

Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut dilakukan pembahasan dan analisa. Analisa ini dilakukan untuk melihat kecenderungan-kecenderungan yang menarik untuk diungkapkan. Demikian halnya penelusuran terhadap logika jawaban terhadap keseluruhan pertanyaan dan pernyataan yang diajukan. Pola jawaban dari responden juga dijadikan dasar untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa yang menjadi responden penelitian.

2. Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, pada bagian ini akan dilakukan analisis terhadap persepsi mahasiswa terhadap akuntabilitas pelayanan birokrasi, transparansi pelayanan birokrasi dan prinsip kewajaran pelayanan birokrasi.

2.A. Persepsi Mahasiswa Terhadap Akuntabilitas Pelayanan Birokrasi

Pada bagian data dipergunakan untuk diperuntukkan mengetahui empat persepsi terkait akuntabilitas. Pertama, persepsi terhadap akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Kedua, persepsi terhadap semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga.

Persepsi ketiga, yakni Persepsi terhadap akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Keempat, persepsi terhadap evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan

Dalam mengetahui persepsi terhadap akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja diperoleh data yang dapat diuraikan secara lebih rinci di bawah ini. Parameter yang dipakai dalam menggali persepsi tentang kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja ini berupa tiga pertanyaan penelitian yang diberi kode B1, B2 dan B3. Prosentase jawaban atas parameter dilakukan untuk mengetahui tingkat persepsi mahasiswa.

Dari data yang diperoleh dapat dijelaskan bahwa persepsi dari pernyataan B1 mengenai para pegawai yang dilihat/kenal oleh mahasiswa selalu datang tepat waktu (tidak terlambat) untuk masuk kerja, ternyata memperoleh tanggapan jawaban sebanyak dua

orang sangat setuju, enam menjawab setuju, sembilan biasa saja, sebelas orang tidak setuju dan satu sangat tidak setuju.

Gambaran persepsi mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi dengan jumlah sampel sebanyak 29 maka jumlah skor ideal tingkat persetujuan untuk setiap item jika semua menjawab SS adalah $5 \times 29 = 145$. Guna mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban dari B1 seperti di bawah ini :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	= 2×5	= 10
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	= 6×4	= 24
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	= 9×3	= 27
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	= 11×2	= 22
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	= 1×1	= 1
Jumlah total		= 84

Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden $= (84 : 145) \times 100\% = 56\%$. Dengan prosentase tersebut dapat dikatakan bahwa persepsi mahasiswa bahwa para pegawai yang dilihat/kenal oleh mahasiswa selalu datang tepat waktu (tidak terlambat) untuk masuk kerja, cukup berimbang antara yang setuju dan tidak setuju. Namun angka lebih dari 50 menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa lebih banyak setuju bahwa birokrasi berperilaku disiplin dalam masuk kerja.

Sedangkan pernyataan B2 bahwa para pegawai yang saya lihat/kenal selalu pulang tepat waktu (tidak membolos) dalam meninggalkan kantor dijawab sangat setuju hanya 3 orang, setuju tujuh orang, biasa saja 10 orang, tidak setuju juga 7 orang dan sangat tidak setuju dijawab oleh 2 mahasiswa.

Sebagaimana cara di atas, analisis data ini dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban B2 seperti adalah sebagai berikut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	= 3×5	= 15
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	= 7×4	= 28
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	= 10×3	= 30
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	= 7×2	= 14
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	= 2×1	= 2

Jumlah total =89

Berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden $= (89:145) \times 100\% = 61\%$. Dengan hasil ini maka tingkat persetujuan mahasiswa terkait persepsi tentang para pegawai yang dilihat/kenal selalu pulang tepat waktu (tidak membolos) dalam meninggalkan kantor cukup tinggi. Perilaku tidak membolos di mata para mahasiswa sudah cukup banyak dilakukan oleh birokrasi.

Bisa jadi pegawai memang telah memiliki kedisiplinan akan jam kerja. Kecenderungan ini dimungkinkan terjadi dari sisi kehadiran sebagian besar pegawai berusaha memenuhi jam kehadiran. Paling tidak secara kehadiran fisik terkesan terpenuhi di mata publik meskipun dari sisi substansi pekerjaan yang diselesaikan kurang bisa dijamin. Di sejumlah instansi juga telah dilengkapi dengan perangkat perekam kehadiran yang canggih.

Demikian pula persepsi dari pernyataan B3 bahwa pegawai melaksanakan tugasnya selalu berdasar pada prosedur dan aturan mendapat tanggapan berupa jawaban sangat setuju sebanyak 2, menjawab setuju 14 orang, menyatakan biasa saja 8, tidak setuju 4 responden dan sangat tidak setuju sebanyak 1 mahasiswa.

Penghitungan rata-rata jawaban digunakan untuk menganalisis data ini. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah jawaban dengan skor skala mulai 1 hingga 5. Berikut ini proses penghitungan rata-rata jawaban B3 tersebut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=2x5	=10
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=14x4	=76
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=8x3	=24
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=4x2	= 8
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=1x1	= 1
Jumlah total		=119

Berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden $= (119:145) \times 100\% = 82\%$. Pegawai melaksanakan tugasnya selalu berdasar pada prosedur dan aturan dinilai oleh mahasiswa tinggi. Mahasiswa menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pegawai senantiasa berdasarkan aturan yang berlaku.

Sedangkan untuk persepsi kedua yaitu persepsi terhadap semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu)

maupun pada level lembaga data diuraikan masing-masing uraian di bawah ini. Pertanyaan untuk mengungkap persepsi kinerja lembaga ini diberikan kode B4, B5, B6 dan B7. Masing-masing pertanyaan memperoleh jawaban diuraikan yang dapat dianalisis seperti di bawah ini.

Data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa pendapat sangat setuju ada 3 jawaban, setuju diberikan oleh 9 responden, biasa saja menurut 12 mahasiswa, tidak setuju 4 orang dan sangat tidak setuju hanya 1 orang ketika diajukan pernyataan B4 bahwa para pegawai bekerja dengan sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan dengan penuh kesadaran ada atau tidak ada pengawasan atasan.

Analisis data ini dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban B4 seperti di bawah ini :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=3x5	=15
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=9x4	=36
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=12x3	=36
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=4x2	= 8
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=1x1	= 1
Jumlah total		=96

Berbeda dengan sebelumnya para pegawai bekerja dengan agak sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan dengan penuh kesadaran ada atau tidak ada pengawasan atasan. Hal ini berdasarkan prosentase data di atas yang menunjukkan tingkat persetujuan responden $= (96:145) \times 100\% = 66\%$. Ada sebagian mahasiswa yang kadang-kadang menjumpai pegawai yang tidak dengan kesadaran dan tidak bersungguh-sungguh memeberikan pelayanan terutama bila kurang pengawasan dari atasan.

Sebanyak 4 orang sangat setuju, 9 orang menjawab setuju 12 lainnya menyatakan biasa saja, 3 orang berpendapat tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju pada saat mahasiswa dihadapkan pada pernyataan B5 bahwa para pegawai yang dijumpainya bekerja dengan baik dan bertanggung jawab dijadikan kebanggaan atau gaya hidup bagi semua pegawai.

Sebagaimana cara di atas, analisis data ini dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban B5 seperti adalah sebagai berikut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=4x5	=20
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=9x4	=36
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=12x3	=36
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=3x2	= 6
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=0x1	= 0
Jumlah total		=98

Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden $= (98:145) \times 100\% = 67\%$. Dengan hasil itu mahasiswa menilai bahwa para pegawai yang dijumpainya bekerja dengan agak baik dan bertanggung jawab dijadikan kebanggaan atau gaya hidup bagi semua pegawai. Sebagian dari mereka sudah melihat semua itu berjalan. Namun sebagian responden juga masih menjumpai pegawai yang tidak bekerja dengan baik, kurang bertanggung jawab dan pekerjaan hanya dijadikan sebagai pemenuhan kewajiban saja.

Sedangkan sebanyak 2 orang sangat setuju, 15 orang menjawab setuju 10 lainnya menyatakan biasa saja, 2 orang berpendapat tidak setuju dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju apabila mahasiswa disodori pernyataan B6 bahwa para pegawai sangat tahu aturan kerjanya dan konsekuen menegakkannya.

Penghitungan rata-rata jawaban digunakan untuk menganalisis data ini. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah jawaban dengan skor skala mulai 1 hingga 5. Berikut ini proses penghitungan rata-rata jawaban B6 tersebut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=2x5	=10
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=15x4	=20
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=10x3	=30
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=2x2	= 4
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=0x1	= 0
Jumlah total		=64

Dengan berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden $= (64:145) \times 100\% = 45\%$. Mahasiswa memberikan penilaian berbeda terhadap persepsi bahwa para pegawai sangat tahu aturan kerjanya dan konsekuen menegakkannya. Nilai untuk perilaku ini agak

rendah. Artinya di mata mahasiswa ada pegawai yang tidak tahu aturan kerjanya. Ada pegawai yang tidak konsekuen menegakkan aturan meskipun mereka tidak tahu aturan. Ada pula pegawai yang sebenarnya mengetahui aturan kerjanya namun tidak konsekuen menegakkannya.

Demikian juga pendapat yang menyatakan sangat setuju ada 1 jawaban, setuju diberikan oleh 11 responden, biasa saja menurut 13 mahasiswa, tidak setuju 3 orang dan sangat tidak setuju hanya 1 orang menjawab pernyataan B7 jika melanggar aturan, pegawai merasa sungkan dengan teman-teman sejawatnya. Dalam pandangan mahasiswa pernyataan itu disikapi dengan jawaban.

Penghitungan rata-rata jawaban digunakan untuk menganalisis data ini. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah jawaban dengan skor skala mulai 1 hingga 5. Berikut ini proses penghitungan rata-rata jawaban B7 tersebut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=1x5 = 5
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=11x4 =44
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=13x3 =39
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=3x2 = 6
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=1x1 = 1
Jumlah total	=95

Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan jika melanggar aturan, pegawai merasa sungkan dengan teman-teman sejawatnya $= (95 : 145) \times 100\% = 65\%$. Angka ini menunjukkan bahwa angka kesungkunan pada para pegawai agak tinggi dalam pandangan mahasiswa. Masih ada pegawai yang suka melanggar aturan. Ada pula pegawai yang bersikap masa bodoh terhadap sejawatnya meskipun melakukan pelanggaran aturan.

Persepsi terhadap akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan dipersepsi oleh mahasiswa dengan gambaran pemberian jawaban atas pertanyaan tersebut. Dengan kode pertanyaan penelitian B8, B9 dan B 10 dapat ditampilkan analisa data pada penjelesannya sebagai berikut.

Dari data penelitian yang berhasil dikumpulkan dapat dijelaskan bahwa persepsi dari pertanyaan B 8 terkait dapat mengetahui dengan mudah pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan pegawai melalui mekanisme pelaporan, ternyata memperoleh tanggapan jawaban sebanyak lima orang sangat setuju, 13 menjawab setuju, empat biasa saja, juga enam orang tidak setuju dan satu sangat tidak setuju.

Sebagaimana cara di atas, analisis data ini dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban B8 seperti adalah sebagai berikut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=5x5	=25
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=13x4	=52
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=4x3	=12
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=6x2	=12
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=1x1	= 1
Jumlah total		=102

Berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden $= (102:145) \times 100\% = 70\%$. Persepsi terkait dapat mengetahui dengan mudah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pegawai melalui mekanisme pelaporan agak tinggi. Di samping yang menganggap mudah sebagian mahasiswa bisa saja mengalami kesulitan untuk mengetahui laporan kinerja pegawai. Bisa juga sebagian lainnya mengetahui pertanggungjawaban tidak melalui mekanisme pelaporan tetapi melalui cara yang lain.

Sementara pernyataan B9 mengkonfirmasi bahwa mahasiswa dapat memberikan penilaian atas pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pegawai atau tidak. Pernyataan ini dijawab sangat setuju hanya 4 orang, setuju sembilan orang, biasa saja 10 orang, tidak setuju 4 orang dan sangat tidak setuju dijawab oleh 2 mahasiswa.

Gambaran persepsi mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi dengan jumlah sampel sebanyak 29 maka jumlah skor ideal tingkat persetujuan untuk setiap item jika semua menjawab SS adalah $5 \times 29 = 145$. Guna mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban dari B9 seperti di bawah ini :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=4x5	=20
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=9x4	=36
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=10x3	=30
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=4x2	= 8

Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS =2x1 = 2

Jumlah total =96

Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden = $(96 : 145) \times 100\% = 66\%$. Persepsi agak tinggi diberikan mahasiswa pada saat dikonfirmasi bahwa mereka dapat memberikan penilaian atas pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pegawai. Jawaban agak tinggi mengandung pengertian masih ada mahasiswa yang tidak dapat memberikan penilaian atas pertanggungjawaban pegawai.

Demikian juga pendapat yang menyatakan sangat setuju ada 4 jawaban, setuju diberikan oleh 12 responden, biasa saja menurut 9 mahasiswa, tidak setuju 4 orang dan tak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju pada saat dihadapkan pada pernyataan B 10 yang menyatakan bahwa ukuran pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pegawai cukup tinggi.

Sebagaimana cara di atas, analisis data ini dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban B10 seperti adalah sebagai berikut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS =4x5 =20

Jumlah skor untuk orang yang menjawab S =12x4 =48

Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS =9x3 =27

Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS =4x2 = 8

Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS =0x1 = 0

Jumlah total =103

Berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang menyatakan bahwa ukuran pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pegawai cukup tinggi sebesar = $(103:145) \times 100\% =71\%$. Artinya mahasiswa memberi penilaian cukup tinggi terhadap tingkat ukuran pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pegawai.

Kode pertanyaan penelitian B11, B12 dan B 13 yang ditampilkan berikutnya merupakan data yang diperoleh untuk mengetahui persepsi keempat terkait akuntabilitas. Gambaran data yang diperoleh itu mengenai persepsi terhadap evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan diperlihatkan pada uraian di bawah ini .

Data yang dikumpulkan dapat dijelaskan bahwa persepsi dari pernyataan B11 yang diungkapkan pada mahasiswa yang berbunyi Anda selalu merasakan manfaat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang kegiatan pelayanan para pegawai pemerintah. Pernyataan tersebut ternyata memperoleh tanggapan jawaban sebanyak tiga orang sangat setuju, lima belas menjawab setuju, delapan biasa saja, tiga orang tidak setuju dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Gambaran persepsi mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi dengan jumlah sampel sebanyak 29 maka jumlah skor ideal tingkat persetujuan untuk setiap item jika semua menjawab SS adalah $5 \times 29 = 145$. Guna mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban dari B11 seperti di bawah ini :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	$=3 \times 5$	$=15$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	$=15 \times 4$	$=60$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	$=8 \times 3$	$=24$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	$=3 \times 2$	$=6$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	$=0 \times 1$	$=0$
Jumlah total		$=105$

Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden $= (105:145) \times 100\% = 72\%$ untuk selalu merasakan manfaat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang kegiatan pelayanan para pegawai pemerintah itu cukup tinggi. Banyak layanan yang diperoleh mahasiswa mempengaruhi penilaian ini. Bukan penilaian yang tinggi atau sangat tinggi diberikan dimungkinkan ada mahasiswa yang merasakan manfaat bukan secara langsung melainkan secara tidak langsung.

Sebanyak 14 orang sangat setuju, 11 orang menjawab setuju 2 lainnya menyatakan biasa saja, 2 orang berpendapat tidak setuju dan tidak ada jawaban sangat tidak setuju apabila mahasiswa dihadapkan pada pernyataan B12 bahwa program dan pelayanan yang manfaatnya kurang dirasakan segera diperbaiki.

Penghitungan rata-rata jawaban digunakan untuk menganalisis data ini. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah jawaban dengan skor skala mulai 1 hingga 5. Untuk mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data

dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Berikut ini proses penghitungan rata-rata jawaban B12 tersebut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=14x5 =70
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=11x4 =44
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=2x3 = 6
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=2x2 = 4
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=0x1 = 0
Jumlah total	=124

Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden terhadap bahwa program dan pelayanan yang manfaatnya kurang dirasakan segera diperbaiki $= (124 : 145) \times 100\% = 85\%$. Prosentase ini menunjukkan bahwa penilaian itu termasuk kategori tinggi. Mahasiswa memiliki kepercayaan tinggi terhadap mekanisme yang ada dalam pelayanan birokrasi. Peran mekanisme dianggap memadai oleh sebagian besar mahasiswa.

Demikian juga pendapat yang menyatakan sangat setuju ada 14 jawaban, setuju diberikan oleh 11 responden, biasa saja menurut 3 mahasiswa, tidak setuju 1 orang dan tak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju pada saat dihadapkan pada pernyataan B 13 yang menyatakan atasan selalu memberikan peringatan, teguran atau sanksi kepada pegawai yang kinerjanya tidak bagus.

Analisis data ini dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Guna mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban B13 seperti di bawah ini :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=14x5 =70
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=11x4 =44
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=3x3 = 9
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=1x2 = 2
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=0x1 = 0
Jumlah total	=114

Data itu menunjukkan bahwa tingkat persetujuan responden $= (114:145) \times 100\% = 78\%$. Kategori penilaian tentang atasan selalu memberikan peringatan, teguran atau sanksi kepada pegawai yang kinerjanya tidak bagus itu termasuk pada tingkat yang cukup tinggi. Hal ini lebih di dasarkan pada logika bahwa sanksi dan teguran memang sudah selayaknya diberikan kepada pegawai yang kinerjanya tidak bagus. Sebuah kencernderungan yang bisa dianggap sebagai hal yang umum.

2.B. Persepsi Mahasiswa Terhadap Transparansi Pelayanan Birokrasi

Ada tiga persepsi mengenai transparansi yang hendak dilihat dengan menggunakan data penelitian ini. Pertama, persepsi terhadap kontrol kebijakan. Kedua, persepsi terhadap proses penganggaran. Ketiga, persepsi terhadap proses penyusunan dan pembahasan kegiatan atau proyek pembangunan

Gambaran persepsi terhadap kontrol kebijakan diperoleh data yang diuraikan seperti di bawah ini. Ada lima pertanyaan yang diajukan dan diberikan kode pertanya C1 hingga C5 sebagaimana tampak pada uraian berikut ini.

Tabel di atas menunjukkan bahwa persepsi dari pernyataan C1 terkait persepsi bahwa mahasiswa mudah mengetahui semua proses kebijakan dilakukan dapat dilihat dari jawaban yang diberikan. Pernyataan tersebut ternyata memperoleh tanggapan jawaban sebanyak tiga orang sangat setuju, delapan menjawab setuju, enam biasa saja, sepuluh orang tidak setuju dan hanya satu responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Gambaran persepsi mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi dengan jumlah sampel sebanyak 29 maka jumlah skor ideal tingkat persetujuan untuk setiap item jika semua menjawab SS adalah $5 \times 29 = 145$. Guna mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban dari C1 seperti di bawah ini :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	$= 3 \times 5$	$= 15$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	$= 8 \times 4$	$= 32$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	$= 6 \times 3$	$= 18$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	$= 10 \times 2$	$= 20$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	$= 1 \times 1$	$= 1$
Jumlah total		$= 86$

Prosentase tingkat persetujuan responden terhadap mahasiswa mudah mengetahui semua proses kebijakan dilakukan $= (86 : 145) \times 100\% = 59\%$. Posisi ini menunjukkan persepsi ragu-ragu. Karena posisinya mendekati 50% dimana relatif seimbang antara mahasiswa yang setuju dan tidak setuju. Sebagian mahasiswa menganggap mudah mengetahui proses kebijakan dilakukan sedangkan sebagian yang lain sulit melakukannya. Ada juga yang beranggapan tidak semua melainkan hanya sedikit proses kebijakan dilakukan sementara sebagian lainnya sulit dilakukan.

Sementara pernyataan C2 mengkonfirmasi bahwa mahasiswa dapat dengan mudah mengetahui segala bentuk penyimpangan atau tidak. Pernyataan ini dijawab sangat setuju hanya 2 orang, setuju enam belas, biasa saja 7 orang, tidak setuju 3 orang dan sangat tidak setuju dijawab oleh 1 mahasiswa.

Sebagaimana cara di atas, analisis data ini dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban C2 seperti adalah sebagai berikut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	$= 2 \times 5$	$= 10$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	$= 16 \times 4$	$= 64$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	$= 7 \times 3$	$= 21$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	$= 3 \times 2$	$= 6$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	$= 1 \times 1$	$= 1$
Jumlah total		$= 102$

Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden terhadap mahasiswa dapat dengan mudah mengetahui segala bentuk penyimpangan $= (102 : 145) \times 100\% = 70\%$. Angka itu termasuk tingkatan agak tinggi. Tingkatan ini bisa menunjukkan bahwa bukan segala bentuk bisa diketahui. Penyimpangan-penyimpangan yang relatif besar dan diekspos media massa sangat mungkin mempengaruhi persepsi mahasiswa ini.

Sebanyak 2 orang sangat setuju, 5 orang menjawab setuju 11 lainnya menyatakan biasa saja, 10 orang berpendapat tidak setuju dan 1 jawaban sangat tidak setuju apabila mahasiswa dihadapkan pada pernyataan C3 bahwa Anda berkesempatan memberi kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.

Penghitungan rata-rata jawaban digunakan untuk menganalisis data ini. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah jawaban dengan skor skala mulai 1

hingga 5. Untuk mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Berikut ini proses penghitungan rata-rata jawaban C3 tersebut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=2x5	=10
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=5x4	=20
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=11x3	=33
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=10x2	=20
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=1x1	= 1
Jumlah total		=84

Berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden terhadap kesempatan memberi kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan $= (84 : 145) \times 100\% = 57\%$. Terkait dengan kontrol, mahasiswa merasa bahwa mereka ragu-ragu memiliki kesempatan bisa memberikannya. Hal ini mengingat tingkatan prosentase itu mendekati angka 50 yang menunjukkan berimbangny pihak yang menyatakan setuju dengan pihak yang tidak setuju.

Kecenderungan ini menunjukkan bahwa untuk perilaku yang mengandung unsur campur tangan dari pihak mahasiswa terhadap birokrasi menunjukkan posisinya yang lemah.

Sedangkan pernyataan C4 bahwa semua pegawai menjunjung keterbukaan dan kejujuran dijawab sangat setuju hanya 4 orang, sembilan tujuh orang, biasa saja 7 orang, tidak setuju juga 8 orang dan sangat tidak setuju dijawab oleh 1 mahasiswa.

Analisis data ini dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Guna mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban C4 seperti di bawah ini :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=4x5	=20
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=9x4	=36
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=7x3	=21
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=8x2	=16
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=1x1	= 1
Jumlah total		=94

Prosentase tingkat persetujuan responden terhadap persepsi bahwa semua pegawai menjunjung keterbukaan dan kejujuran $= (94 : 145) \times 100\% = 64\%$. Angka ini hanya menunjukkan tingkat agak tinggi. Artinya masih ada sebagian mahasiswa yang memiliki anggapan bahwa keterbukaan dan kejujuran belum dijunjung oleh pegawai. Bisa pula sudah dijunjung namun belum semua pegawai melakukannya.

Demikian juga pendapat yang menyatakan sangat setuju ada 6 jawaban, setuju diberikan oleh 11 responden, biasa saja menurut 6 mahasiswa, tidak setuju 6 orang dan tak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju pada saat dihadapkan pada pernyataan C5 yang menyatakan Anda sangat menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*) kepada para pegawai bahwa mereka sungguh-sungguh ingin memberi pelayanan terbaik pada masyarakat.

Penghitungan rata-rata jawaban digunakan untuk menganalisis data ini. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah jawaban dengan skor skala mulai 1 hingga 5. Untuk mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Berikut ini proses penghitungan rata-rata C5 tersebut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	$= 6 \times 5 = 30$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	$= 11 \times 4 = 44$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	$= 6 \times 3 = 9$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	$= 6 \times 2 = 12$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	$= 0 \times 1 = 0$
Jumlah total	$= 95$

Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan bahwa mahasiswa sangat menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*) kepada para pegawai bahwa mereka sungguh-sungguh ingin memberi pelayanan terbaik pada masyarakat $= (95 : 145) \times 100\% = 65\%$. Angka ini juga baru pada taraf agak tinggi, bukan tinggi atau sangat tinggi. Hal itu berarti memang sebagian besar mahasiswa telah percaya bahwa birokrasi bersungguh-sungguh memberi pelayanan terbaik pada masyarakat. Namun masih ada mahasiswa yang belum memiliki kepercayaan yang tinggi kepada birokrasi. Di sisi lain mahasiswa juga bisa mempersoalkan kesungguhan birokrasi untuk memberikan pelayanan terbaiknya.

Kinerja birokrasi terkait proses penganggaran khususnya persepsi terhadap penganggaran yang bersifat bottom up dipersepsi oleh mahasiswa dengan gambaran pemberian jawaban atas pertanyaan tersebut. Dengan kode pertanyaan penelitian C6, C7 dan C8 dapat dianalisa data yang diperoleh pada penjelasan berikut ini.

Dari data yang berhasil dikumpulkan dapat dijelaskan bahwa persepsi dari pernyataan C6 yang diungkapkan pada mahasiswa yang berbunyi perencanaan anggaran kegiatan lembaga pemerintah berdasarkan masukan dari masyarakat. Pernyataan tersebut ternyata memperoleh tanggapan jawaban sebanyak tiga orang sangat setuju, sebelas menjawab setuju, sembilan biasa saja, empat orang tidak setuju dan dua responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Gambaran persepsi mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi dengan jumlah sampel sebanyak 29 maka jumlah skor ideal tingkat persetujuan untuk setiap item jika semua menjawab SS adalah $5 \times 29 = 145$. Guna mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban C6 seperti di bawah ini :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	$=3 \times 5$	$=15$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	$=11 \times 4$	$=44$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	$=9 \times 3$	$=27$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	$=4 \times 2$	$=8$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	$=2 \times 1$	$=2$
Jumlah total		$=96$

Penghitungan ini melihat prosentase persepsi tentang perencanaan anggaran kegiatan lembaga pemerintah berdasarkan masukan dari masyarakat. Berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden terhadap $= (96 : 145) \times 100\% = 66\%$. Tingkatan itu termasuk kategori agak tinggi. Mahasiswa menganggap bahwa masukan dari masyarakat sudah menjadi pertimbangan dalam perencanaan anggaran meski tidak semua masukan terakomodir. Sebagian mahasiswa masih memberikan jawaban ketidaksetujuannya.

Sebanyak 8 orang sangat setuju, 13 orang menjawab setuju 3 lainnya menyatakan biasa saja, 4 orang berpendapat tidak setuju dan 1 jawaban sangat tidak setuju apabila mahasiswa dihadapkan pada pernyataan C7 bahwa penerapan/implementasi anggaran lembaga pemerintah diperuntukkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.

Sebagaimana cara di atas, analisis data ini dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban C7 seperti adalah sebagai berikut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=8x5	=40
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=13x4	=52
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=3x3	= 9
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=4x2	= 8
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=1x1	= 1
Jumlah total		=110

Tingkat persetujuan responden terhadap persepsi bahwa penerapan/implementasi anggaran lembaga pemerintah diperuntukkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. $= (110 : 145) \times 100\% = 75\%$. Untuk persepsi ini ternyata mahasiswa memberikan penilaian yang cukup tinggi. Hal yang mengundang analisa bahwa kecenderungan mahasiswa berfikir secara normatif bahwa anggaran sudah tentu diterapkan untuk mengatasi masalah publik. Mahasiswa masih menampakkan kecenderungan mengabaikan sejumlah kasus korupsi yang menimpa sebagian anggaran di sejumlah instansi. Bisa pula interaksi mahasiswa relatif terbatas pada instansi yang belum terekspos media tertimpa masalah korupsi.

Sementara pernyataan C8 mengkonfirmasi bahwa mahasiswa mengerti masyarakat berhak tahu dengan mudah laporan pertanggungjawaban dan boleh melakukan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Pernyataan ini dijawab sangat setuju hanya 8 orang, setuju 12, biasa saja 4 orang, tidak setuju 4 orang dan sangat tidak setuju dijawab oleh 1 mahasiswa.

Penghitungan rata-rata jawaban digunakan untuk menganalisis data ini. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah jawaban dengan skor skala mulai 1 hingga 5. Untuk mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Berikut ini proses penghitungan rata-rata jawaban C8 tersebut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=8x5	= 40
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=12x4	=48
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=4x3	=12
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=4x2	= 8

Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS =1x1 = 1

Jumlah total =109

Demikian juga persepsi tentang mahasiswa mengerti masyarakat berhak tahu dengan mudah laporan pertanggungjawaban dan boleh melakukan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran dinilai cukup tinggi. Berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden terhadap $= (109 : 145) \times 100\% = 75\%$. Hal ini terkait pernyataan yang mengandung konfirmasi pengertian. Pernyataan ini relatif bersifat normative dan mendapatkan persetujuan dari sejumlah besar mahasiswa.

Kode pertanyaan penelitian C9 hingga C14 yang ditampilkan berikutnya merupakan data yang diperoleh untuk mengetahui persepsi keempat terkait transparansi. Gambaran data yang diperoleh itu mengenai persepsi terhadap proses penyusunan dan pembahasan kegiatan atau proyek pembangunan diperlihatkan pada uraian pada dan analisa di bawah ini

Data menunjukkan bahwa pendapat sangat setuju ada 4 jawaban, setuju diberikan oleh 9 responden, biasa saja menurut 8 mahasiswa, tidak setuju 5 orang dan sangat tidak setuju 3 orang ketika diajukan pernyataan C9 bahwa mahasiswa dapat mengetahui dengan mudah proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja) program pembangunan dan pekerjaan di kantor.

Sebagaimana sebelumnya Gambaran persepsi mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi dengan jumlah sampel sebanyak 29 maka jumlah skor ideal tingkat persetujuan untuk setiap item jika semua menjawab SS adalah $5 \times 29 = 145$. Guna mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban dari C9 seperti di bawah ini :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS =4x5 =20

Jumlah skor untuk orang yang menjawab S =9x4 =36

Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS =8x3 =24

Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS =5x2 =10

Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS =3x1 = 3

Jumlah total =93

Tingkat persetujuan responden terhadap persepsi bahwa mahasiswa dapat mengetahui dengan mudah proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan

(anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja) program pembangunan dan pekerjaan di kantor. $= (93 : 145) \times 100\% = 64\%$. Angka itu lagi-lagi menunjukkan taraf yang lebih rendah yakni hanya agak tinggi manakala pernyataan terkait dengan aktivitas diri mahasiswa berkaitan dengan campur tangan mereka pada pelayanan birokrasi. Berbeda pendapat tentang pernyataan yang tidak menuntut keterlibatan mereka dalam mempengaruhi pelayanan birokrasi.

Sebanyak 7 orang sangat setuju, 16 orang menjawab setuju 2 lainnya menyatakan tidak setuju, 2 orang berpendapat tidak setuju dan hanya 2 sangat tidak setuju pada saat mahasiswa dihadapkan pada pernyataan C10 bahwa pengelolaan proyek senantiasa memperhatikan pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis.

Sebagaimana cara di atas, analisis data ini dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban C10 seperti adalah sebagai berikut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	$= 7 \times 5 = 35$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	$= 16 \times 4 = 64$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	$= 2 \times 3 = 6$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	$= 2 \times 2 = 4$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	$= 2 \times 1 = 2$
Jumlah total	$= 111$

Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden $= (111 : 145) \times 100\% = 76\%$. Persepsi bahwa pengelolaan proyek senantiasa memperhatikan pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis dinilai cukup tinggi. Dengan kecenderungan yang sama persepsi ini memperoleh penilaian yang lebih tinggi dari pernyataan sebelumnya. Di samping tidak terkait langsung dengan keterlibatan mahasiswa, para responden juga tampak kurang memperhatikan detail dan sumber data untuk menjadi bekal pengetahuan dalam memberikan sikap pada pernyataan ini.

Sedangkan sebanyak 10 orang sangat setuju, 14 orang menjawab setuju 3 lainnya menyatakan biasa saja, tidak ada yang berpendapat tidak setuju dan 2 yang menjawab sangat tidak setuju apabila mahasiswa disodori pernyataan C11 bahwa selalu ada proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Penghitungan rata-rata jawaban digunakan untuk menganalisis data ini. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah jawaban dengan skor skala mulai 1 hingga 5. Untuk mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Berikut ini proses penghitungan rata-rata jawaban C11 tersebut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=10x5 =50
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=14x4 =56
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=3x3 = 9
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=0x2 = 0
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=2x1 = 2
Jumlah total	=117

Bahwa selalu ada proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik memperoleh tingkat persetujuan responden sebanyak $=(117 :145) \times 100\% = 80\%$. Keyakinan mahasiswa ini mendorong kekhawatiran bahwa mahasiswa hanya mengukur proyek-proyek fisik yang mudah diamati oleh publik semisal pembangunan jalan dan jembatan yang diawasi mandor bangunan. Kesederhanaan pandangan ini menggugah rasa penasaran pada sikap kritis mereka sebagai insane yang tengah dekat dan berkuat dengan data-data di bangku perkuliahan.

Sebanyak 7 orang sangat setuju, 11 orang menjawab setuju 9 lainnya menyatakan tidak setuju, 1 orang berpendapat tidak setuju dan hanya 1 sangat tidak setuju pada saat mahasiswa dihadapkan pada pernyataan C12 bahwa selalu ada proses pengawasan yang lebih khusus lagi terhadap proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri.

Analisis data ini dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Guna mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban C12 seperti di bawah ini :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=7x5 =35
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=11x4 =44
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=9x3 =27

Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=1x2	= 2
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=1x1	= 1
Jumlah total		=110

Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden terhadap persepsi bahwa selalu ada proses pengawasan yang lebih khusus lagi terhadap proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri $= (110 : 145) \times 100\% = 75\%$. Sebuah penilaian cukup tinggi diberikan pada persepsi ini. Penilaian menunjukkan bahwa mahasiswa percaya terhadap proses pengawasan terhadap pelayanan publik.

Pernyataan C13 yang diajukan adalah proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara terbuka. Pernyataan tersebut mendapat jawaban sebanyak 8 orang sangat setuju, 12 orang menjawab setuju 3 lainnya menyatakan biasa saja, 3 orang berpendapat tidak setuju dan 1 mahasiswa yang menjawab sangat tidak setuju

Penghitungan rata-rata jawaban digunakan untuk menganalisis data ini. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah jawaban dengan skor skala mulai 1 hingga 5. Untuk mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Berikut ini proses penghitungan rata-rata jawaban C13 tersebut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=8x5	=40
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=12x4	=48
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=3x3	= 9
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=3x2	= 6
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=1x1	= 1
Jumlah total		=104

Tingkat persetujuan responden terhadap proses evaluasi terhadap persepsi bahwa penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara terbuka $= (104 : 145) \times 100\% = 71\%$. Paralel dengan persepsi sebelumnya tingkat persetujuan cukup tinggi ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kepercayaan yang cukup pada evaluasi kegiatan.

Sedangkan pernyataan C14 terkait persepsi terhadap proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan. Pernyataan ini dijawab sangat setuju hanya 11 orang, setuju 11, biasa saja 2 orang, tidak setuju 4 orang dan sangat tidak setuju dijawab oleh 1 mahasiswa.

Penghitungan rata-rata jawaban digunakan untuk menganalisis data ini. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah jawaban dengan skor skala mulai 1 hingga 5. Untuk mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Berikut ini proses penghitungan rata-rata tersebut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=11x5 =55
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=11x4 =44
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=2x3 = 6
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=4x2 = 8
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=1x1 = 1
Jumlah total	=114

Demikian juga persepsi terhadap proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan memperoleh tingkat persetujuan responden $= (114 : 145) \times 100\% = 78\%$. Tingkat cukup tinggi menunjukkan kepercayaan mahasiswa akan evaluasi secara konsisten ditunjukkan oleh mahasiswa.

2.1.c. Persepsi Mahasiswa Terhadap Kewajaran Pelayanan Birokrasi

Sedangkan Persepsi terhadap penegakan prinsip kewajaran (fairness) ditunjukkan melalui data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini diuraikan lebih lanjut di bawah ini. Dengan kode pertanyaan penelitian D1 hingga D11 yang ditampilkan berikutnya merupakan data yang diperoleh untuk mengetahui persepsi keempat terkait transparansi. Gambaran kecenderungan jawaban yang diperoleh mengenai persepsi terhadap langkah penegakan prinsip kewajaran (fairness) diperlihatkan pada analisis yang dilakukan di bawah ini.

Data penelitian menunjukkan bahwa pendapat sangat setuju ada 2 jawaban, setuju diberikan oleh 11 responden, biasa saja menurut 6 mahasiswa, tidak setuju 7 orang dan sangat tidak setuju 3 orang ketika diajukan pernyataan D1 bahwa dalam penganggaran tak pernah dijumpai berbagai bentuk penggelembungan dana (*mark up*).

Gambaran persepsi mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi dengan jumlah sampel sebanyak 29 maka jumlah skor ideal tingkat persetujuan untuk setiap item jika semua menjawab SS adalah $5 \times 29 = 145$. Guna mengetahui tingkat persetujuan masing-

masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban dari D1 seperti di bawah ini :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=2x5	=10
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=11x4	=44
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=6x3	=18
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=7x2	=14
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=3x1	= 3
Jumlah total		=89

Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden terhadap persepsi mahasiswa bahwa dalam penganggaran tak pernah dijumpai berbagai bentuk penggelembungan dana (*mark up*). $= (89 : 145) \times 100\% = 61\%$. Tingkat ini hanya pada kategori agak tinggi. sebab di dalam pernyataan digunakan kata tak pernah ditanggapi dengan hati-hati oleh sebagian mahasiswa. Sebagian mahasiswa tidak terjebak bahwa tak pernah berarti tak satupun peristiwa penggelembungan dana itu terjadi. Namun demikian sebagian besar mahasiswa justru mengabaikannya dan memberikan persetujuannya.

Sebanyak 3 orang sangat setuju, 15 orang menjawab setuju 6 lainnya menyatakan biasa saja, 4 orang berpendapat tidak setuju dan hanya 1 sangat tidak setuju pada saat mahasiswa dihadapkan pada pernyataan D2 bahwa dalam penganggaran selalu ada upaya untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) maupun ketidakwajaran lainnya.

Sebagaimana cara di atas, analisis data ini dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban D2 seperti adalah sebagai berikut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=3x5	=15
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=15x4	=60
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=6x3	=18
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=4x2	= 8
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=1x1	= 1
Jumlah total		=102

Tingkat persetujuan responden terhadap bahwa dalam penganggaran selalu ada upaya untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) maupun ketidakwajaran lainnya $= (102 : 145) \times 100\% = 70\%$. Lagi-lagi kepercayaan mahasiswa akan adanya

pengecegan dan evaluasi ditunjukkan dengan persetujuan cukup tinggi. Kepercayaan ini bisa pula merupakan harapan dan sesuatu yang dianggap sudah seiyaknya dilakukan.

Sementara D3 merupakan pernyataan tentang pegawai bekerja mempertimbangkan aspek kesinambungan atau keberlanjutan. Pernyataan tersebut mendapat jawaban sebanyak tidak ada responden yang memberikan jawaban sangat setuju, 16 orang menjawab setuju 9 lainnya menyatakan biasa saja, 3 orang berpendapat tidak setuju dan tak satupun mahasiswa yang menjawab sangat tidak setuju.

Penghitungan rata-rata jawaban digunakan untuk menganalisis data ini. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah jawaban dengan skor skala mulai 1 hingga 5. Untuk mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Berikut ini proses penghitungan rata-rata jawaban D3 tersebut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=0x5	=0
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=16x4	=64
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=9x3	=27
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=3x2	= 6
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=0x1	= 0
Jumlah total		=97

Persepsi bahwa pegawai bekerja mempertimbangkan aspek kesinambungan atau keberlanjutan memperoleh tingkat persetujuan responden terhadap $= (97 : 145) \times 100\% = 66\%$. Persepsi yang berkaitan dengan kemampuan pegawai ini memperoleh persetujuan agak tinggi. Senada dengan kesungguhan, kemampuan ini juga dipersepsi tidak begitu baik oleh mahasiswa. Komitmen dan kondite pribadi pegawai belum mendapat tempat pada persepsi mahasiswa.

Sebanyak 1 orang sangat setuju, 15 orang menjawab setuju 9 lainnya menyatakan biasa saja, 4 orang berpendapat tidak setuju dan tak seorangpun yang sangat tidak setuju pada saat mahasiswa dihadapkan pada pernyataan D4 bahwa dalam bekerja pegawai selalu taat pada asas pelayanan terbaik.

Analisis data ini dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Guna mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban

berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban D4 seperti di bawah ini :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=1x5 = 5
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=15x4 =60
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=9x3 =27
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=4x2 = 8
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=0x1 = 0
Jumlah total	=100

Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden terhadap persepsi bahwa dalam bekerja pegawai selalu taat pada asas pelayanan terbaik $= (100 : 145) \times 100\% = 68\%$. Persepsi normatif ini juga lagi-lagi hanya disetujui agak tinggi. Hal ini karena ketaatan juga terkait dengan komitmen individu pegawai.

Sedangkan persepsi berikutnya tidak seorangpun menjawab sangat setuju, 17 orang menjawab setuju 9 lainnya menyatakan biasa saja, 3 berpendapat tidak setuju dan tak ada yang menjawab sangat tidak setuju apabila mahasiswa disodori pernyataan D5 bahwa pegawai selalu mengupayakan pengeluaran yang tidak melampaui batas (*off budget*).

Penghitungan rata-rata jawaban digunakan untuk menganalisis data ini. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah jawaban dengan skor skala mulai 1 hingga 5. Untuk mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Berikut ini proses penghitungan rata-rata jawaban D5 tersebut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=0x5 = 0
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=17x4 =68
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=9x3 =27
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=3x2 = 6
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=0x1 = 0
Jumlah total	=101

Berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden terhadap persepsi bahwa pegawai selalu mengupayakan pengeluaran yang tidak melampaui batas (*off budget*). $= (101 : 145) \times 100\% = 69\%$. Dalam hal penghematan pun mahasiswa masih memberikan persetujuan hanya agak tinggi. Kemampuan ini juga sangat ditentukan oleh kredibilitas

individu. Dalam hal ini tingkat persepsi mahasiswa tak setinggi pernyataan yang terkait dengan mekanisme, aturan dan evaluasi.

Pernyataan D6 adalah pernyataan bahwa dalam melaksanakan program pembangunan/pelayanan selalu ada kebijakan untuk efisiensi dan efektifitas. Pernyataan tersebut ternyata memperoleh tanggapan jawaban sebanyak satu orang sangat setuju, delapan belas menjawab setuju, tujuh biasa saja, tiga orang tidak setuju dan tak satupun responden yang menjawab sangat tidak setuju.

Gambaran persepsi mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi dengan jumlah sampel sebanyak 29 maka jumlah skor ideal tingkat persetujuan untuk setiap item jika semua menjawab SS adalah $5 \times 29 = 145$. Guna mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban dari D6 seperti di bawah ini :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=1x5 = 5
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=18x4 =72
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=7x3 =21
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=3x2 = 6
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=0x1 = 0
Jumlah total	=104

Persepsi bahwa dalam melaksanakan program pembangunan/pelayanan selalu ada kebijakan untuk efisiensi dan efektifitas memperoleh tingkat persetujuan responden $= (104 : 145) \times 100\% = 71\%$. Karena berhubungan dengan kebijakan maka persepsi ini menunjukkan tingkat persetujuan yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan kecenderungan seperti sebelumnya untuk persepsi yang berhubungan dengan unsure normatif memperoleh tingkat kepercayaan lebih baik dibanding unsur yang erat ditentukan oleh individu pegawai.

Sedangkan pernyataan D7 berisi ada jaminan ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas *value for money* dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Pernyataan ini dijawab sangat setuju hanya 1 orang, setuju 17, biasa saja 9 orang, tidak setuju 2 orang dan sangat tidak setuju tidak memperoleh jawaban.

Sebagaimana cara di atas, analisis data ini dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban D7 seperti adalah sebagai berikut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=1x5 = 5
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=17x4 =68
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=9x3 =27
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=2x2 = 4
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=0x1 = 0
Jumlah total	=104

Tingkat persetujuan responden terhadap persepsi bahwa ada jaminan ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas *value for money* dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan $= (104 : 145) \times 100\% = 71\%$. Tingkat ini termasuk kategori cukup tinggi. Perencanaan bisa dianggar sebagai mekanisme maka tak heran mendapat persetujuan cukup tinggi. Kesan normatif yang kuat mendorong mahasiswa memberikan persetujuan ini.

Sebanyak 2 orang sangat setuju, 14 orang menjawab setuju 9 lainnya menyatakan biasa saja, 3 orang berpendapat tidak setuju dan tidak ada jawaban sangat tidak setuju apabila mahasiswa dihadapkan pada pernyataan D8 bahwa dalam proses perencanaan pembangunan selalu menggunakan anggaran yang terprediksi dengan baik.

Penghitungan rata-rata jawaban digunakan untuk menganalisis data ini. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah jawaban dengan skor skala mulai 1 hingga 5. Untuk mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Berikut ini proses penghitungan rata-rata D8 tersebut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=2x5 =10
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=14x4 =56
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=9x3 =27
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=3x2 = 6
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=0x1 = 0
Jumlah total	=99

Persepsi bahwa dalam proses perencanaan pembangunan selalu menggunakan anggaran yang terprediksi dengan baik mendapat tingkat persetujuan responden terhadap $= (99:145) \times 100\% = 68\%$. Kata terprediksi kental dengan kemampuan dan komitmen individu maka hanya memperoleh tingkat persetujuan agak baik. Kembali mahasiswa menunjukkan persepsi yang kurang baik bila terkait dengan komitmen dan kemampuan individu pegawai.

Jawaban responden menunjukkan bahwa pendapat sangat setuju ada 1 jawaban, setuju diberikan oleh 12 responden, biasa saja menurut 9 mahasiswa, tidak setuju 7 orang dan sangat tidak setuju tak memperoleh jawaban ketika diajukan pernyataan D9 tidak ada bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis.

Analisis data ini dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Guna mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban D9 seperti di bawah ini :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	$= 1 \times 5 = 5$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	$= 12 \times 4 = 48$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	$= 9 \times 3 = 27$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	$= 7 \times 2 = 14$
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	$= 0 \times 1 = 0$
Jumlah total	$= 94$

Berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan responden terhadap persepsi bahwa tidak ada bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis $= (94 : 145) \times 100\% = 64\%$. Masih berkaitan dengan persepsi sebelumnya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja dihubungkan dengan individu pegawai maka tingkat persetujuannya agak baik. Hal ini menunjukkan konsistensi jawaban yang diberikan oleh mahasiswa.

Demikian juga pendapat yang menyatakan sangat setuju ada 3 jawaban, setuju diberikan oleh 18 responden, biasa saja menurut 6 mahasiswa, tidak setuju 2 orang dan sangat tidak setuju tidak ada yang memilih apabila mahasiswa disodori pernyataan D10

bahwa pada lembaga negara selalu dijumpai sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja.

Penghitungan rata-rata jawaban digunakan untuk menganalisis data ini. Penghitungan dilakukan dengan mengalikan jumlah jawaban dengan skor skala mulai 1 hingga 5. Untuk mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Berikut ini proses penghitungan rata-rata jawaban D10 tersebut :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=3x5	=15
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=18x4	=72
Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=6x3	=18
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=2x2	= 4
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=0x1	= 0
Jumlah total		=109

Tingkat persetujuan responden terhadap bahwa pada lembaga negara selalu dijumpai sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja $= (109 : 145) \times 100\% = 75\%$. Hingga mendekati akhir kegiatan menjawab kuisioner ini mahasiswa masih konsisten menunjukkan kepercayaannya pada mekanisme dan aturan. Terbukti persepsi ini mendapat tingkat persetujuan cukup tinggi. Sistem informasi menjadi mekanisme yang dipercaya oleh mahasiswa. Demikian pula dengan penilaian kinerja pegawai.

Sementara pernyataan D11 mengkonfirmasi bahwa proses pengambilan keputusan selalu berdasarkan prinsip kejujuran. Pernyataan ini dijawab sangat setuju hanya 4 orang, setuju dua belas orang, biasa saja 9 orang, tidak setuju 4 orang dan tidak ada mahasiswa sangat tidak setuju.

Analisis data ini dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Guna mengetahui tingkat persetujuan masing-masing item tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring setiap jawaban dari responden. Penghitungan rata-rata jawaban D11 seperti di bawah ini :

Jumlah skor untuk orang yang menjawab SS	=4x5	=20
Jumlah skor untuk orang yang menjawab S	=12x4	=48

Jumlah skor untuk orang yang menjawab BS	=9x3	=27
Jumlah skor untuk orang yang menjawab TS	=4x2	= 8
Jumlah skor untuk orang yang menjawab STS	=0x1	= 0
Jumlah total		=103

Pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa proses pengambilan keputusan selalu berdasarkan prinsip kejujuran memperoleh tingkat persetujuan responden terhadap $(103 : 145) \times 100\% = 71\%$. Pengambilan keputusan termasuk mekanisme dalam pelayanan public. Maka mahasiswa memberikan persetujuan cukup tinggi. Sebuah persetujuan yang lebih baik dibandingkan dengan item yang lain. Dengan demikian mahasiswa telah memberikan persetujuannya yang bisa menjadi dasar untuk memahami persepsi mereka terhadap item-item yang menjadi unsur perilaku anti korupsi birokrasi.

3. Persepsi Mahasiswa Terhadap Perilaku Anti Korupsi Birokrasi

Setelah masing-masing pertanyaan penelitian di analisa tingkat persetujuan dari responden kini saatnya untuk mengkompilasinya. Kompilasi dilakukan pada tiga variabel perilaku anti korupsi. Pertama variabel tentang persepsi mahasiswa terhadap akuntabilitas belayanan birokrasi. Kedua variabel persepsi mengenai transparansi. Ketiga persepsi terhadap penegakan prinsip kewajaran (fairness)

Pada bagian persepsi mahasiswa terhadap akuntabilitas pelayanan birokrasi. Data dipergunakan untuk diperuntukkan mengetahui empat persepsi terkait akuntabilitas. Pertama, persepsi terhadap akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Kedua, persepsi terhadap semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga.

Persepsi ketiga, yakni Persepsi terhadap akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Keempat, persepsi terhadap evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan

Dalam mengetahui persepsi terhadap akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja diperoleh data yang dapat diuraikan secara lebih rinci di bawah ini. Parameter yang dipakai dalam menggali persepsi tentang kesesuaian antara

aturan dan pelaksanaan kerja ini berupa tiga pertanyaan penelitian yang diberi kode B1, B2 dan B3. Persepsi terhadap akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan dipersepsi oleh mahasiswa dengan gambaran pemberian jawaban atas pertanyaan tersebut. Dengan kode pertanyaan penelitian B8, B9 dan B 10.Kode pertanyaan penelitian B11, B12 dan B 13 yang ditampilkan berikutnya merupakan data yang diperoleh untuk mengetahui persepsi keempat terkait akuntabilitas.

Setelah diperoleh prosentase tingkat persetujuan masing-masing item pada bagian persepsi akuntabilitas makan akan diambil rata-ratanya. Penghitungan rata-rata jawaban digunakan untuk menganalisis data ini secara keseluruhan. Penghitungan dilakukan dengan menjumlah semua tingkat persetujuan dan membaginya dengan angka 13 jumlah pertanyaan. Untuk mengetahui tingkat persetujuan item persepsi akuntabilitas pelayanan birokrasi tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawabannya. Berikut ini proses penghitungan rata-rata tingkat persetujuan akuntabilitas layanan birokrasi tersebut :

Pertanyaan	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13
Tingkat Persetujuan (%)	56	61	82	66	67	45	65	70	66	71	72	85	78
Rata-rata Tingkat Persetujuan	68												

Tabel 9.rata-rata tingkat persetujuan terhadap akuntabilitas pelayanan birokrasi

Rata-rata tingkat persetujuan terhadap akuntabilitas birokrasi yang ditunjukkan tabel di atas memperlihatkan angka 68. Tingkatan itu termasuk agak tinggi. Artinya sebagian besar mahasiswa memiliki persepsi bahwa pelayanan birokrasi sudah akuntabel. Namun masih ada sebagian lainnya yang menganggap bahwa pelayan birokrasi belum akuntabel. Bahkan bisa pula mahasiswa beranggapan ada sejumlah bentuk layanan birokrasi yang sangat akuntabel tetapi masih ada beberapa bentuk layan yang tidak akuntabel. Hal ini tentu berbeda dengan apabila tingkat persetujuan mereka lebih tinggi atau bahkan sebaliknya.

Skor tertinggi 85 diperoleh pertanyaan B12 tentang program dan pelayanan yang manfaatnya kurang dirasakan segera diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kepercayaan yang tinggi tentang adanya mekanisme pada pelayanan birokrasi.

Tatanan normatif baik secara berjenjang maupun internal birokrasi dianggap selalu membingkai tatanan pelayanan birokrasi.

Sebaliknya skor terendah 45 diberikan pada pertanyaan B6 bahwa para pegawai sangat tahu aturan kerjanya dan konsekuen menegakkannya. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak percaya pada komitmen, kesungguhan dan kemampuan individu pegawai. Meskipun ada tatanan aturan tetapi keberhasilan pelaksanaan pelayanan yang akuntabel bisa terganggu oleh kinerja individu pegawai.

Ada tiga persepsi mengenai transparansi yang hendak dilihat dengan menggunakan data penelitian ini. Pertama, persepsi terhadap kontrol kebijakan. Kedua, persepsi terhadap proses penganggaran. Ketiga, persepsi terhadap proses penyusunan dan pembahasan kegiatan atau proyek pembangunan. Gambaran persepsi terhadap kontrol kebijakan diperoleh data yang diuraikan seperti di bawah ini. Ada lima pertanyaan yang diajukan dan diberikan kode pertanyaan C1 hingga C5.

Kinerja birokrasi terkait proses penganggaran khususnya persepsi terhadap penganggaran yang bersifat bottom up dipersepsi oleh mahasiswa dengan gambaran pemberian jawaban atas pertanyaan tersebut. Dengan kode pertanyaan penelitian C6, C7 dan C8. Kode pertanyaan penelitian C9 hingga C14 yang ditampilkan berikutnya merupakan data yang diperoleh untuk mengetahui persepsi keempat terkait transparansi. Gambaran data yang diperoleh itu mengenai persepsi terhadap proses penyusunan dan pembahasan kegiatan atau proyek pembangunan.

Sementara penghitungan rata-rata jawaban juga digunakan untuk menganalisis tingkat persetujuan tentang transparansi ini secara keseluruhan. Penghitungan dilakukan dengan menjumlah semua tingkat persetujuan dan membaginya dengan angka 14 jumlah pertanyaan. Untuk mengetahui tingkat persetujuan item persepsi akuntabilitas pelayanan birokrasi tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawabannya. Berikut ini proses penghitungan rata-rata tingkat persetujuan transparansi layanan birokrasi tersebut :

Pertanyaan	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14
Tingkat Persetujuan (%)	59	70	57	64	65	66	75	75	64	76	80	75	71	78

Rata-rata	69
Tingkat	
Persetujuan	

Tabel Rata-rata tingkat persetujuan terhadap transparansi layanan birokrasi

Dari tabel rata-rata di atas dapat dikatakan bahwa tingkat persetujuan mahasiswa terhadap transparansi pelayanan birokrasi termasuk agak tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa memang sebagian besar mahasiswa berpendapat bahwa pelayanan birokrasi sudah transparan namun masih ada sebagian yang lain berpendapat belum transparan. Bisa pula dikatakan di sejumlah instansi birokrasi sudah menerapkan transparansi pelayanan tetapi ada pula instansi yang belum menerapkan transparansi.

Dapat dilihat dari tabel bahwa tingkat persetujuan terhadap pertanyaan C3 yang mengkonfirmasi bahwa Anda berkesempatan memberi kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan mendapat skor terendah sebesar 57. Kecenderungan ini dapat dijelaskan bahwa hal-hal yang terkait dengan peluang campur tangan mahasiswa dalam transparansi pelayanan birokrasi dinilai rendah. Mahasiswa beranggapan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk terlibat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan birokrasi.

Skor tertinggi 80 diberikan pada pertanyaan C11 tentang selalu ada proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Hal ini memperlihatkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap adanya aturan normatif, pengawasan dan evaluasi dalam pelayanan birokrasi.

Sedangkan Persepsi terhadap penegakan prinsip kewajaran (fairness) ditunjukkan melalui data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini diuraikan lebih lanjut di bawah ini. Dengan kode pertanyaan penelitian D1 hingga D11 yang ditampilkan berikutnya merupakan data yang diperoleh untuk mengetahui persepsi keempat terkait transparansi. Pertanyaan itu akan dipergunakan untuk mendapatkan gambaran kecenderungan jawaban mengenai persepsi terhadap langkah penegakan prinsip kewajaran (fairness).

Demikian juga penghitungan rata-rata jawaban digunakan untuk menganalisis tingkat persetujuan terhadap persepsi tentang kewajaran ini secara keseluruhan. Penghitungan dilakukan dengan menjumlah semua tingkat persetujuan dan membaginya

dengan angka 11 jumlah pertanyaan. Untuk mengetahui tingkat persetujuan item persepsi akuntabilitas pelayanan birokrasi tersebut analisis data dilakukan dengan menghitung rata-rata jawabannya. Berikut ini proses penghitungan rata-rata tingkat persetujuan akuntabilitas layanan birokrasi tersebut :

Pertanyaan	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
Tingkat Persetujuan (%)	61	70	66	68	69	71	71	68	64	75	71
Rata-rata Tingkat Persetujuan	68										

Tabel 10. Rata-rata tingkat persetujuan terhadap kewajaran pelayanan birokrasi

Tabel itu juga menunjukkan tingkat persetujuan mahasiswa terhadap prinsip kewajaran dalam pelayanan birokrasi yang agak tinggi sebesar 68. Secara individu pelayanan birokrasi oleh sejumlah pegawai telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kewajaran. Namun oleh sebagian pegawai yang lain masih dilaksanakan tanpa mengedepankan prinsip kewajaran. Demikian juga terdapat sebagian instansi yang telah menerapkan prinsip kewajaran dengan baik, namun ada pula instansi yang mengabaikan.

Skor terendah diberikan 61 terkait dengan pertanyaan D1 bahwa dalam penganggaran tak pernah dijumpai berbagai bentuk penggelembungan dana (*mark up*). Mahasiswa memahami bahwa pernyataan tidak pernah adalah hal yang sangat kecil terjadi. Apalagi kecenderungan kondisi secara umum pelayanan birokrasi menunjukkan hal yang kurang mengedepankan prinsip kewajaran. Persepsi ini juga sangat erat dengan komitmen, kesungguhan dan kemampuan individu pegawai sehingga mendapatkan penilaian yang rendah akibat kepercayaan terhadap individu pegawai yang rendah.

Sedangkan tingkat persetujuan tertinggi sebesar 75 diberikan pada pertanyaan D10 yang menyatakan pada lembaga negara selalu dijumpai sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja. Lagi-lagi mahasiswa memberikan kepercayaan pada mekanisme, aturan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan birokrasi.

BAB. V.KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Rata-rata tingkat persetujuan terhadap akuntabilitas birokrasi yang ditunjukkan tabel di atas memperlihatkan tingkatan yang agak tinggi.
2. Tingkat persetujuan mahasiswa terhadap transparansi pelayanan birokrasi termasuk agak tinggi.
3. Tingkat persetujuan mahasiswa terhadap prinsip kewajaran dalam pelayanan birokrasi yang agak tinggi.
4. Mahasiswa memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap adanya aturan normatif, pengawasan dan evaluasi dalam pelayanan birokrasi.
5. Mahasiswa memiliki tingkat kepercayaan yang rendah pada komitmen, kesungguhan dan kemampuan individu pegawai dalam melakukan pelayanan birokrasi yang berkualitas .
6. Terkait dengan peluang campur tangan mahasiswa dalam transparansi pelayanan birokrasi dinilai oleh rendah oleh mereka. Mahasiswa beranggapan bahwa mereka mengalami kesulitan untuk terlibat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan birokrasi.
7. Persepsi mahasiswa terhadap perilaku antikorupsi birokrasi termasuk kategori agak kuat

B. Saran

Saran yang bisa diberikan berdasarkan hasil penelitaian ini ada beberapa hal. Beberapa hal itu diperuntukkan bagi peningkatan pengetahuan perilaku anti korupsi dan peningkatan pelayanan birokrasi.

1. Dibutuhkan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi. Hal ini didasarkan pada kecenderungan persepsi terhadap kualitas pelayanan birokrasi yang terkait dengan persoalan yang lebih mendetail dan pemahaman lebih dalam bertolak belakang dengan realita pelayanan yang ada.
2. Perlunya pendidikan anti korupsi diberikan dengan lebih intensif kepada generasi muda. Termasuk patut dipikirkannya materi anti korupsi masuk dalam kurikulum pendidikan.
3. Disamping penegakan hukum, pengawasan dan evaluasi, peningkatan pelayanan birokrasi hendaknya lebih ditujukan pada peningkatan kemampuan, komitmen dan kesungguhan para pegawai (birokrat). Hal ini penting karena kapabilitas individu inilah yang menentukan perilaku anti korupsi bisa menjadi budaya dalam pelayanan birokrasi di negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrow Martin, 1989, *Birokrasi* (terjemahan.), Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Dwiyanto Agus, dkk, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Thoha Miftah, 2002, *Pespektif Perilaku Birokrasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Rabl, T., 2011, The Impact of Situational Influences on Corruption in Organizations. *Journal of Business Ethics*, 100, 85–101.
- Simbolon Maropen, 2008, *Persepsi dan Kepribadian*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 2 Nomor 1, Maret 2008.
- Atbar Samuel, 2012, *Pengaruh Prilaku Birokrasi Terhadap Kualitas Layanan Publik Pada Distrik Semangga*, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial " SOCIETAS " Nomor 1 Jilid 1 Halaman 1-19 April 2012, ISSN 2252-603X
- <http://indudt.blog.fisip.uns.ac.id/2012/03/01/metode-survey-dalam-metode-penelitian-kuantitatif; 4/01/2012>
- <http://mebermutu.org/admin/.../Anti%20Corruption%20%20Action%20Plan.ppt>, 29 jan 2013
Pukul : 14;47 Pengertian Korupsi Dan Prinsip-Prinsip Anti Korupsi, Kuliah Anti Korupsi Universitas Paramadina Jakarta, 2010
- <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/1763/C3.%20Falah-UNISULA%20%28fixed%29.pdf?sequence=1> 14 Feb 2013 Pukul 07;25

<http://www.pusbangsitek.com/?p=1177>Membangun Perilaku Anti Korupsi (1), 16 Februari 2013, Pukul 17;15 WIB

<http://adriansyahnantu.wordpress.com/2012/03/17/bab-ii-landasan-teori-persepsi-ahasiswa-terhadap-fraud-studi-empiris-pada-mahasiswa-akuntansi-universitas-hasanuddin/> 5 Sept 2013 14;49 WIB

<http://www.tempo.co/read/news/2013/03/04/058464996> 10 September 2013 11:15 WIB.

<http://www.antikorupsi.org/id/content/memberantas-korupsi-melalui-kurikulum> 10 September 2013 12:09 WIB

<http://tentangpelayananpublik.blogspot.com/2011/01/jenis-dan-pola-pelayanan-publik.html>, 23 nov 13, 10;40 wib

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012

Lampiran a

TABEL 5.1
PENENTUAN JUMLAH SAMPEL DARI POPULASI TERTENTU
DENGAN TARAF KESALAHAN 1%, 5%, DAN 10%

N	s			N	s			N	s		
	1%	5%	10%		1%	5%	10%		1%	5%	10%
10	10	10	10	280	197	155	138	2800	537	310	247
15	15	14	14	290	202	158	140	3000	543	312	248
20	19	19	19	300	207	161	143	3500	558	317	251
25	24	23	23	320	216	167	147	4000	569	320	254
30	29	28	27	340	225	172	151	4500	578	323	255
35	33	32	31	360	234	177	155	5000	586	326	257
40	38	36	35	380	242	182	158	6000	598	329	259
45	42	40	39	400	250	186	162	7000	606	332	261
50	47	44	42	420	257	191	165	8000	613	334	263
55	51	48	46	440	265	195	168	9000	618	335	263
60	55	51	49	460	272	198	171	10000	622	336	263
65	59	55	53	480	279	202	173	15000	635	340	266
70	63	58	56	500	285	205	176	20000	642	342	267
75	67	62	59	550	301	213	182	30000	649	344	268
80	71	65	62	600	315	221	187	40000	563	345	269
85	75	68	65	650	329	227	191	50000	655	346	269
90	79	72	68	700	341	233	195	75000	658	346	270
95	83	75	71	750	352	238	199	100000	659	347	270
100	87	78	73	800	363	243	202	150000	661	347	270
110	94	84	78	850	373	247	205	200000	661	347	270
120	102	89	83	900	382	251	208	250000	662	348	270
130	109	95	88	950	391	255	211	300000	662	348	270
140	116	100	92	1000	399	258	213	350000	662	348	270
150	122	105	97	1100	414	265	217	400000	662	348	270
160	129	110	101	1200	427	270	221	450000	663	348	270
170	135	114	105	1300	440	275	224	500000	663	348	270
180	142	119	108	1400	450	279	227	550000	663	348	270
190	148	123	112	1500	460	283	229	600000	663	348	270
200	154	127	115	1600	469	286	232	650000	663	348	270
210	160	131	118	1700	477	289	234	700000	663	348	270
220	165	135	122	1800	485	292	235	750000	663	348	270
230	171	139	125	1900	492	294	237	800000	663	348	271
240	176	142	127	2000	498	297	238	850000	663	348	271
250	182	146	130	2200	510	301	241	900000	663	348	271
260	187	149	133	2400	520	304	243	950000	663	348	271
270	192	152	135	2600	529	307	245	1000000	663	348	271
									664	349	272

KUESIONER

Mahasiswa yang terhormat,

Kuesioner ini dilakukan sebagai penelitian dosen ke DIKTI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UT terhadap perilaku anti korupsi birokrasi. Persepsi mahasiswa terhadap perilaku anti korupsi birokrasi pada penelitian ini dikaji dari sisi akuntabilitas, transparansi dan prinsip kewajaran.

PETUNJUK PENGISIAN

1. Semua informasi yang diterima sebagai hasil pengisian kuesioner ini bersifat RAHASIA dan identitas pribadi Anda tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain
2. Tidak ada penilaian benar atau salah terhadap jawaban yang Anda berikan, semua jawaban diperlakukan sama dalam penelitian ini
3. Untuk memudahkan memilih dengan versi *softcopy* ini, Anda cukup memilih salah satu jawaban di kolom yang tersedia dengan cara **MENGGANTI DENGAN 'X'** (**silang**) angka yang sesuai dengan persepsi Bapak/Ibu,
4. Bagian A adalah pertanyaan demografi, Anda dapat menyilang jawaban terpilih dan mengisi (ketik) pada item pertanyaan UPBJJ-UT. Sedangkan bagian B, C dan D pilihan jawaban yang tersedia: (1) Sangat Tidak Setuju (STS), (2) Tidak Setuju (TS), (3) Biasa Saja (BS), (4) Setuju (S), dan (5) Sangat Setuju (SS).

Contoh pengisian bagian B, C dan D:

Jawaban terpilih "4"
(Diganti dg X)

	STS	TS	BS	S	SS
Para pegawai yang saya lihat/kenal selalu datang tepat waktu (tidak terlambat) untuk masuk kerja	1	2	3	X	5

5. Mohon bantuan Anda agar kuesioner yang telah diisi dikirimkan kembali ke alamat *email* : diyatsunout@gmail.com

Hormat Saya,

Suyatno, SIP.,M.Si

BAGIAN A. DATA DEMOGRAFI

- A1. Jenis Kelamin : 1 Pria 2 Wanita NIM :
- A2. Usia : 1 >20 Tahun
 2 21 – 30 Tahun
 3 31 – 40 Tahun
 4 41 – 50 Tahun
 5 51 – 60 Tahun
 6 >61 Tahun
- A3. Pekerjaan /profesi : 1 TNI/POLRI 4 Wiraswasta
 2 PNS 5 Lainnya
 3 Swasta
- A4. UPBJJ-UT : (jawaban diketik)
- A5. Berinteraksi dengan birokrasi :
 1 Tidak pernah
 2 Jarang (Seperti, 1 kali dalam 6 - 12 bulan)
 3 Sering (Seperti, 1 kali dalam setiap 1 – 5 bulan)
 4 Sangat Sering (seperti, lebih dari 1 kali setiap bulan)

BAGIAN B. PERTANYAAN RISET MENGENAI AKUNTABILITAS



1. Persepsi terhadap akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja

No	Kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja	STS	TS	BS	S	SS
<i>Menurut pendapat saya:</i>						
B1	Para pegawai yang saya lihat/kenal selalu datang tepat waktu (tidak terlambat) untuk masuk kerja	1	2	3	4	5
B2	Para pegawai yang saya lihat/kenal selalu pulang tepat waktu (tidak membolos) dalam meninggalkan kantor	1	2	3	4	5
B3	Pegawai melaksanakan tugasnya selalu berdasar pada prosedur dan aturan.	1	2	3	4	5

2. Persepsi terhadap semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga.

No	Pertanggungjawaban	STS	TS	BS	S	SS
<i>Menurut pendapat saya:</i>						
B4	Para pegawai bekerja dengan sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan dengan penuh kesadaran ada atau tidak ada pengawasan atasan.	1	2	3	4	5
B5	Bekerja dengan baik dan bertanggung jawab dijadikan kebanggaan atau gaya hidup bagi semua pegawai.	1	2	3	4	5
B6	Para pegawai sangat tahu aturan kerjanya dan konsekuen menegakkannya	1	2	3	4	5
B7	Jika melanggar aturan, pegawai merasa sungkan dengan teman-teman sejawatnya.	1	2	3	4	5

3. Persepsi terhadap akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan.

No	Evaluasi publik	STS	TS	BS	S	SS
<i>Menurut pendapat saya:</i>						

B8	Anda dapat mengetahui dengan mudah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pegawai melalui mekanisme pelaporan	1	2	3	4	5
B 9	Anda dapat memberikan penilaian atas pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pegawai.	1	2	3	4	5
B 10	Ukuran pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pegawai cukup tinggi.	1	2	3	4	5

4. Persepsi terhadap evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan

No	Manfaat	STS	TS	BS	S	SS
<i>Menurut pendapat saya:</i>						
B11	Anda selalu merasakan manfaat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang kegiatan pelayanan para pegawai pemerintah.	1	2	3	4	5
B12	Program dan pelayanan yang manfaatnya kurang dirasakan segera diperbaiki.	1	2	3	4	5
B13	Atasan selalu memberikan peringatan, teguran atau sanksi kepada pegawai yang kinerjanya tidak bagus.	1	2	3	4	5

BAGIAN C. PERTANYAAN RISET MENGENAI TRANSPARANSI

1. Persepsi terhadap kontrol kebijakan

No	Kontrol kebijakan oleh publik	STS	TS	BS	S	SS
C1	Anda mudah mengetahui semua proses kebijakan dilakukan	1	2	3	4	5
C2	Anda dengan mudah mengetahui segala bentuk penyimpangan.	1	2	3	4	5
C3	Anda berkesempatan memberi kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan.	1	2	3	4	5
C4	Semua pegawai menjunjung keterbukaan dan kejujuran	1	2	3	4	5

C5	Anda sangat menjunjung tinggi kepercayaan (<i>trust</i>) kepada para pegawai bahwa mereka sungguh-sungguh ingin member pelayanan terbaik pada masyarakat.	1	2	3	4	5
----	---	---	---	---	---	---

2. Persepsi terhadap proses penganggaran

No	<i>Penganggaran yang bersifat bottom up</i>	STS	TS	BS	S	SS
C6	Perencanaan anggaran kegiatan lembaga pemerintah berdasarkan masukan dari masyarakat.	1	2	3	4	5
C7	Penerapan/implementasi anggaran lembaga pemerintah diperuntukkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat.	1	2	3	4	5
C8	Masyarakat berhak tahu dengan mudah laporan pertanggungjawaban dan boleh melakukan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran.	1	2	3	4	5

3. Persepsi terhadap proses penyusunan dan pembahasan kegiatan atau proyek pembangunan

No	<i>Penyusunan dan pembahasan kegiatan</i>	STS	TS	BS	S	SS
C9	Anda dapat mengetahui dengan mudah proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja) program pembangunan.pekerjaan di kantor	1	2	3	4	5
C10	Pengelolaan proyek senantiasa memperhatikan pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban secara teknis.	1	2	3	4	5
C11	Selalu ada proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik	1	2	3	4	5
C12	Selalu ada proses pengawasan yang lebih khusus lagi terhadap proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri.	1	2	3	4	5
C13	Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara terbuka	1	2	3	4	5
C14	Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap out put kerja-kerja pembangunan	1	2	3	4	5

BAGIAN D. PERTANYAAN RISET MENGENAI KEWAJARAN**1. Persepsi terhadap penegakan prinsip kewajaran (fairness)**

No	Langkah penegakan prinsip kewajaran (fairness)	STS	TS	BS	S	SS
Menurut Pendapat saya :						
D1	Dalam penganggaran tak pernah dijumpai berbagai bentuk penggelembungan dana (<i>mark up</i>)	1	2	3	4	5
D2	Dalam penganggaran selalu ada upaya untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) maupun ketidakwajaran lainnya.	1	2	3	4	5
D3	Pegawai bekerja mempertimbangkan aspek kesinambungan atau keberlanjutan	1	2	3	4	5
D4	Dalam bekerja pegawai selalu taat pada asas pelayanan terbaik	1	2	3	4	5
D5	Pegawai selalu mengupayakan pengeluaran yang tidak melampaui batas (<i>off budget</i>)	1	2	3	4	5
D6	Dalam melaksanakan program pembangunan/pelayanan selalu ada kebijakan untuk efisiensi dan efektifitas	1	2	3	4	5
D7	Ada jaminan ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas <i>value for money</i> dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan	1	2	3	4	5
D8	Dalam proses perencanaan pembangunan selalu menggunakan anggaran yang terprediksi dengan baik	1	2	3	4	5
D9	Tidak ada bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja, yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis.	1	2	3	4	5
D10	Pada lembaga negara selalu dijumpai sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja	1	2	3	4	5
D11	Proses pengambilan keputusan selalu berdasarkan prinsip kejujuran	1	2	3	4	5

Terima kasih atas kesediaan Anda untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini

Lampiran 2. Format Justifikasi Anggaran

1. Honor						
Honor	Honor/Jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor per Tahun (Rp)		
				Th I	Th ..	Th n
Ketua				2.000.000		
Anggota 1				1.000.000		
Anggota 2						
Anggota ke n						
SUB TOTAL (Rp)				3.000.000		
2. Peralatan penunjang						
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)		
				Th I	Th ..	Th n
Peralatan penunjang 1	komputer	1	4.000.000	4.000.000		
Peralatan penunjang 2	printer	1	500.000	500.000		
Peralatan penunjang 3	Software statistik	1	500.000	500.000		
Peralatan penunjang 4	Modem internet	1	300.000	300.000		
SUB TOTAL (Rp)				5.300.000		
3. Bahan Habis Pakai						
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun (Rp)		
				Th I	Th ..	Th n
Material 1	kertas	5 rim	30.000	150.000		
Material 2	tinta	2	150.000	300.000		
Material 3	ATK	1 set	250.000	250.000		
Material 4	Pulsa internet	12	50.000	600.000		
Material 5	Dokumentasi	2	250.000	500.000		
SUB TOTAL (Rp)				1.800.000		
4. Perjalanan						
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun (Rp)		
				Th I	Th ..	Th n
Perjalanan ke tempat/kota - Malang	survei/sampling/dll.	2	250.000	500.000		
Perjalanan ke tempat/kota - Jakarta	presentasi	1	2.000.000	2.000.000		
SUB TOTAL (Rp)				2.500.000		
5. Lain-lain						
Kegiatan	Justifikasi	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun (Rp)		
				Th I	Th ..	Th n
Lain-lain (administrasi, publikasi,	survei/sampling/dll.	1	3000.000	300.000		
	administrasi	1	200.000	200.000		
	publikasi	1	500.000	500.000		

seminar, laporan, lainnya sebutkan)	seminar laporan	1 4	1.000.000 100.000	1.000.000 400.000		
SUB TOTAL (Rp)				2.400.000		
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (Rp)						
				Th I	Th ..	Th n
				15.000.000		
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELURUH TAHUN (Rp)				15.000.000		

Lampiran 4. Format Susunan Organisasi Tim Peneliti/Pelaksana dan Pembagian Tugas

No	Nama / NIDN	Instansi Asal	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Suyatno, SIP.,M.Si/ 0026037404	UT	Ilmu Pemerintahan	16	Bertanggung jawab pada seluruh jalannya penelitian
2	Drs. Muhammad Syarif, M.Pd/ 0023125902	UT	Bahasa Indonesia	14	Melaksanakan semua tahapan penelitian

Lampiran 5. Format Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Suyatno, SIP.,M.Si
2	Jenis Kelamin	L
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19740326 200812 1 003
5	NIDN	0026037404
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Kulon Progo, 26 Maret 1974
7	E-mail	suyatno@ut.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	085656230975
9	Alamat Kantor	Jl. Mayjen Sungkono No 9 Malang
10	Nomor Telepon/Faks	Telp. 0341-751600
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = ... orang; S-2 = ... orang; S-3 = ... orang
12	Mata Kuliah yg Diampu	1 Etika Pemerintahan
		2
		3
		Dst

B. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	UGM	UGM	
Bidang Ilmu	Ilmu Pemerintahan	Ilmu Politik	
Tahun Masuk-Lulus	1993-1999	2003-2006	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Dampak Dikeluarkannya Inmendagri Nomor	Implikasi Penerapan E-government	

	10 Tahun 1998 Terhadap Prospek Otonomi Daerah	Terhadap Mekanisme Kerja Birokrasi	
Nama Pembimbing/Promotor	Drs.Riswandha Imawan, MA.Ph.D	Prof. Dr. Pratikno, M.Soc	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

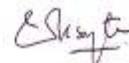
No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2010	Penelitian tentang Perencanaan Manajemen Pemerintahan Daerah Kota Malang Tahun 2009	Universitas Terbuka (LPPM)	10
2	2011	Penelitian tentang Implikasi Penerapan E-government Terhadap Kinerja Birokrasi Pemerintah Kota Malang	Universitas Terbuka (LPPM)	20
3	2012	Analisis Teks Media Tentang Multikulturalisme Pada Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta	Universitas Terbuka (LPPM)	10

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Dosen Pemula.

Malang, 11 Maret 2013

Pengusul,



Suyatno, SIP.,M.Si



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suyatno, SIP.,M.Si
NIDN : 0026307404
Pangkat / Golongan : Penata Muda TK I/III B
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul:

Persepsi Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Terbuka Terhadap Perilaku Anti Korupsi Birokrasi.

yang diusulkan dalam skema Penelitian Dosen Pemula untuk tahun anggaran 2013

bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian


Dra. Dewi A. Padmo Putri, M.A, Ph.D
NIP.196107241987102003



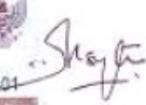
Malang, 11 Maret 2013

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

70145AP5236325401

6000 DJP


Suyatno, SIP.,M.Si

NIP 19740326 200812 1 003

